

KURIKULUM BERBASIS OBE

(OUTCOME BASED EDUCATION)

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2024 - 2028

DAFTAR ISI

A. Identitas Program Studi ii
B. Evaluasi Kurikulum Dan Tracer Study 1
C. Landasan Perancangan Dan Pengembangan Kurikulum 9
D. D. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Dan Nilai-Nilai Budaya Universitas 11
E. Rumusan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan 14
F. Penetapan Bahan Kajian 18
G. Pembentukan Mata Kuliah (Mk) Dan Penentuan Bobot Sks 24
H. Matriks Dan Peta Kurikulum 37
I. Struktur Kurikulum 43
J. Rencana Pengajaran Semester (Rps) 65
K. Strategi Implementasi Kurikulum Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 66
L. Manajemen Dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum 73

A. IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Program Studi	: Hukum
2	Fakultas	: Hukum
3	Perguruan Tinggi	: Universitas Bangka Belitung
4	Nomor SK Pendirian	: 52/D/O/2006
5	Tanggal SK Pendirian	: 12 April 2006
6	Pejabat Penandatangan SK Pendirian	: Menteri Pendidikan Republik Indonesia
7	Mulai Penyelenggaraan	: 12 April 2006
8	Nomor SK Izin Operasional	: 52/D/O/2006
9	Tanggal SK Izin Operasional	: 12 April 2006
10	Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir	: B
11	Nomor SK BAN-PT	: 13117/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021
12	Tanggal Kedaluwarsa	: Tanggal 3 Bulan 12 Tahun 2026
13	Alamat	: Gedung Babel II, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kec. Merawang, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
14	No. Telepon Program Studi	: (0717) 4260026
15	Website	: https://hukum.ubb.ac.id//
16	Email	: jurusanhukumubb@gmail.com

B. EVALUASI KURIKULUM DAN *TRACER STUDY*

Evaluasi kurikulum di Program Studi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. **Mengundang pemangku kepentingan, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dan alumni,** yaitu dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaann Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Wilayah Bangka Belitung, Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Kejaksaan Negeri Bangka, Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Pengadilan Negeri Sungailiat, Pengadilan Agama Pangkalpinang, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, Komisi Pemilihan Umum Dearah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT. Timah, Tbk, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bagian Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kepulauan Bangka Belitung, Wahana Lingkungan Hidup Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Bangka Belitung, Badan Pengawas Pemilu Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Bangka Belitung, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dan tentunya adalah Ikatan Kelurga Alumi FH Universitas Bangka Belitung. Rapat dilaksanakan sebanyak 1 kali yaitu pada Rabu tanggal 10 Bulan Juli Tahun 2024 dan Rapat menghasilkan:

   1) Tim Evaluasi dan Penyusunan Kurikulum Program Studi yang berasal dari pemangku kepentingan *(stakeholder*) dikukuhkan dengan SK Rektor Nomor ……. Tim ini bertugas selama 4 tahun untuk meninjau dan mengevaluasi kembali pelaksanaan kurikulum program studi.
   2) Masukan dari pihak eksternal dan alumni yang hadir yaitu:

Tabel 1. Masukan Dari Pihak Eksternal

No	Pemangku kepentingan/ dunia usaha/dunia industri/dunia kerja/alumni	Masukan	Tindaklanjut
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	Dosen pengajar mata kuliah diharapkan hanya menggunakan satu RPS untuk mata kuliah yang sama.	RPS saat ini setiap Dosen sudah sama untuk mata kuliah yang sama, dan kedepannya akan tetap berlanjut.
2	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perlunya penguatan bahasa inggris dalam kurikulum	Mata kuliah bahasa inggris sudah ada, dan materi bahasa inggris hukum akan diajarkan dalam bahasa inggris.
3	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kurikulum tentang pemahaman penyalahgunaan narkotika dalam kerangka penyalahgunaan pidana narkoba ada pertimbangan tersebut	Materi tentang penyalahgunaan narkotika dipelajari dalam mata kuliah Delik-Delik Dalam KUHP
4	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Menambahkan materi tentang praktek peradilan dan pendidikan anti korupsi	Mata kuliah praktek diperbanyak. Penambahan tersebut meliputi mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata, Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana, Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama dan Hukum Pidana Korupsi
5	KPU Babel	Perlu menambahkan mata kuliah etika dan perlu merumuskan skill kepada mahasiswa	Penempatan mata kuliah Etika dan Tanggung Jawaban Profesi dimasukan menjadi semester satu
6	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung	Tantangan pekerja Babel adalah kurangnya etos kerja sehingga perlu	Penempatan mata kuliah Etika dan Tanggung Jawaban

		dimasukan dalam kurikulum.	Profesi dimasukan menjadi semester satu
7	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kesamaan materi hukum lingkungan dan hukum pertambangan. Materi studi penerapan pengaturan LH terkait juga pemahaman substansi peraturan	Hukum pertambangan sudah ada di dalam kurikulum dan materi substansi peraturan hukum lingkungan sudah ditambahkan dalam RPS
8	WALHI Kepulauan Bangka Belitung	Mata Kuliah Filsafat perlu dimasukan pada semester awal, dan memasukan mata kuliah kejahatan lingkungan	Mata kuliah filsafat di Unversitas UBB terdapat dalam mata kuliah UBB dan Keunggulan Peradaban yang diajarkan pada semester 1, sedangkan untuk mata kuliah khusus filsafat hukum diajarkan pula pada semester 5. Materi Kejahatan lingkungan diberikan pada saat mata kuliah Hukum lingkungan.
9	Bagian Hukum dan HAM Setda Bangka	a. Diharapkan dengan kurikulum Program Studi Hukum berbasis OBE memastikan bahwa kurikulum yang disusun memenuhi kebutuhan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus kuliah b. Program magang mahasiswa diharapkan mahasiswa magang ditekankan budaya disiplin kerja	Kurikulum OBE yang disusun diharapkan mampu membuat lulusan hukum memiiki keterampilan hukum yang dapat diimplementasikan di lingkungan kerja, dan untuk magang mahasiswa diwajibkan untuk menyusun program kerja RPCP sehingga Ketika

			pelaksanaan magang mereka memiliki disiplin kerja
10	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang	Perlu dipenguatan mata kuliah hukum administrasi negara	Pada Kurikulum ini telah tercantum mata kuliah hukum administrasi negara dan mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara dan praktek peradilan
11	Peradi Pangkalpinang	Mohon ditambahkan mata kuliah penalaran hukum karena dibutuhkan dalam praktik beracara.	Untuk mata kuliah penalaran hukum sudah dicantumkan pada mata kuliah konversi MBKM, dan mahasiswa dibekali dengan mata kuliah praktek.
12	Badan Pertanahan Nasional Bangka Belitung	Mohon mata kuliah hukum agraria disampaikan materi pengantar hukum agraria, sejarah hukum agraria, asal hukum adat, perkembangan regulasi hukum agraria dan materi tata ruang disampaikan pada perkembangan OSS	RPS mata kuliah agraria telah disusun sesuai saran dan untuk materi tata ruang, diajar pada mata kuliah peminatan HTN dengan nama mata kuliah hukum tata ruang
13	Bappeda Provinsi	Untuk setiap matakuliah, diharapkan untuk dapat menyisipkan penjelasan tentang pencegahan dan penegakan hukum khususnya dibidang tipikor	Untuk pencegahan dan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi, pada kurikulum OBE ini ada mata kuliah baru berupa mata kuliah Hukum Pidana Korupsi
14	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perlu menambahkan mata kuliah hukum pariwisata	Mata kuliah Hukum pariwisata telah

			ditambahkan ke dalam mata kuliah konversi MBKM

b. Evaluasi hasil penilaian lulusan pengguna

Evaluasi penelusuran lulusan dilakukan dengan menyampaikan kuisioner kepada pengguna lulusan, sehingga didapat rekapitulasi hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan RTL UPPS/PS

No	Jenis Kemampuan	Tingkat Kepuasan Pengguna (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	Etika	55,5%	44,5%	-	-	Mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi diletakan pada semester 1 dengan harapan untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan tingkat kepuasaan pengguna akan etika lulusan prodi hukum universitas Bangka Belitung
2	Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)	44,5%	55,5%	-	-	Kurikulum OBE yang disusun diharapkan dapat menghasilkan lulusan profil yang menguasai keahlian pada bidang hukum, sehingga diharapkan tingkat kepuasaan pengguna akan lulusan hukum UBB bisa meningkat
3	Kemampuan berbahasa asing	22,3%	55,5%	11,1%	11,1%	Pada kurikulum OBE ini, mata kuliah Bahasa inggris akan diarahkan pada

No	Jenis Kemampuan	Tingkat Kepuasan Pengguna (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
						peningkatan kemahiran berbahasa inggris hukum.
4	Penggunaan teknologi informasi	55,5%	44,5%	-	-	Pada kurikulum OBE, ditambahkan mata kuliah hukum siber
5	Kemampuan berkomunikasi	66,6%	33,4%	-	-	MBKM diambil maksimal 20 SKS dengan harapan agar kemampuan berkomunikasi mahasiswa dapat meningkat dan dipertahankan
6	Kerjasama tim	66,6%	33,4%	-	-	MBKM diambil maksimal 20 SKS dengan harapan agar kemampuan berkomunikasi mahasiswa dapat meningkat dan dipertahankan
7	Pengembangan diri	-	-	-	-	-
Jumlah						

Dari hasil kuisioner didapatkan bahwa tingkat kepuasaan pengguna lulusan Fakultas Hukum UBB untuk etika, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi dan kerjasama tim sudah di atas angka 50%. Untuk tingkat kepuasaan kemampuan berbahasa asing, dan Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) masih di bawah 50%, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kepuasaan pengguna lulusan. Adapun untuk hasil dari pengembangan diri belum didapatkan hasilnya.

c. Asosiasi Profesi dan konsorsium Program Studi

Selain mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dalam penyusunan PL dan CPL, Program Studi Hukum mengacu pada Badan Kerjasama Fakultas Hukum (BKS-FH) Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia.

d. Keterlibatan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

Dalam penyusunan kurikulum, tim penyusun kurikulum melibatkan semua dosen program studi, beberapa utusan tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk menjaring masukan. Rapat penyusunan kurikulum melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilakukan sebanyak satu kali, yaitu pada tanggal 30 Juli 2024. Adapun masukan dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dapat dilihat pada **tabel 3** berikut:

Tabel 3. Masukan dari pihak internal

No	Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa	Masukan	Tindaklanjut
1	Muhammad Nur Syahid (Mahasiswa)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami teori maupun praktik sesuai dengan bidang kosentrasi yang dipilih	Dengan kurikulum OBE yang akan diterapkan, maka profil lulusan mahasiswa diharapkan menguasai keterampilan sesuai dengan bidang ilmu hukum
2	Janeke Kusherawati (Mahasiswa)	Kurikulum OBE bagus, semoga dapat diterapkan dengan baik. Dosen harus mengajarkan teori terlebih dahulu, baru diikuti dengan pelaksanaan praktik.	RPS akan disusun sesuai dengan OBE
3	Ave Agave Cristina Situmorang, S.H., M.H.	Kurikulum OBE sudah baik. RPS perlu dibuat sesuai agar benar berbasis OBE	Template RPS OBE akan diberikan, sehingga dosen dapat menyesuaikan RPS terbaru.
4	Toni, S.H., M.H.	Mata kuliah persyarat perlu diperhatikan.	Mata Kuliah persyarat hanya untuk mata kuliah Hukum Pidana, Perdata, HI, HTN, dan HAN.
5	Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.	Perlu ditinjau kembali struktur mata kuliah dan SKS dari mata kuliah	Kurikulum OBE yang disusun telah menyesuaikan antara struktur mata kuliah dan SKS dari setiap mata kuliah
6	Dr. Sigit Nugroho, S.H., M.H.	a. Perlu optimalkan peran GKMI b. Budaya refleksi dibentuk	GKMI ditingkat fakultas dan jurusan telah terbentuk dan berjalan sesuai fungsinya. Pelaksanaan

		c. Evaluasi / lakukan audit pembelajaran	evaluasi atau audit pembelajaran telah dilakukan dan kedepannya akan ditingkatkan

C. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Landasan Yuridis

Berikut adalah landasan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Standar Guru;
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi;
j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
k. Buku Panduan penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industry 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
l. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Nilai Budaya;
m. Peraturan Rektor UBB No.11 tahun 2022 tentang Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
n. Peraturan Rektor UBB No.2 tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 218/UBB/SK/IX/2006 tentang Penetapan Mata Kuliah Universitas Bangka Belitung;
o. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bangka Belitung;
p. Keputusan Rektor No2.15/UN50/KR/X/2020 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Bangka Belitung di Era Industri 4.0 Untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

q. Keputusan Rektor UBB No.2.28/UN50/SP/XII/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) pada Universitas Bangka Belitung;

2. Landasan Historis

Kebutuhan akan kurikulum yang mampu menfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan jamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentranformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di era perubahan abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mempu membaca tanda-tanda revolusi industri 5.0.

3. Landasan Filosofis

Memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat.

4. Landasan Sosiologis

Kurikulum memuat kekhasan universitas (*University Value)* yang diterapkan melalui penyelenggaran Mata Kuliah Wajib Universitas dan Mata Kuliah Wajib Fakultas. Dengan demikian, kekhasan universitas dapat dengan mudah diwujudkan dalam kegiatan perkuliahan melalui mata kuliah-mata kuliah tersebut.

D. RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN NILAI-NILAI BUDAYA UNIVERSITAS

1. Visi Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, dan Program Studi Hukum

Visi UBB tertuang dalam Peraturan Rektor UBB Nomor 1 Tahun 2017 Sedangkan Visi Program Studi Hukum merupakan turunan dari Visi UBB dan Fakultas Hukum

a. **Visi UBB**

Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa pada tahun 2035.

b. **Visi Fakultas**

Menjadi Fakultas Berbasis Riset Berlandaskan Keunggulan Moral, Mental Dan Intelektual Untuk Membangun Peradaban Hukum Berwawasan Lingkungan Tahun 2035.

c. **Visi Program Studi Hukum**

Menjadi Program Studi Berbasis Riset Berlandaskan Keunggulan Moral, Mental Dan Intelektual Untuk Membangun Peradaban Hukum Berwawasan Lingkungan Tahun 2035.

2. Keterkaitan Visi UBB, Fakultas Hukum, dan Program Studi Hukum

Dari penjabaran visi di atas dapat disimpulkan bahwa visi Program Studi Hukum telah selaras dengan visi Universitas Bangka Belitung dan Fakultas Hukum dilihat dari pernyataan "**sebagai Fakultas berbasis riset dengan tujuan membangun peradaban hukum serta capaian Tahun 2035"** pada visi Fakultas Hukum, dan pada visi Program Studi "**sebagai Prodi Hukum yang berorientasi sebagai Prodi berbasis riset dengan tujuan unggul membangun peradaban hukum serta capaian Tahun 2035**" Pernyataan ini menggambarkan bahwa upaya Program Studi Hukum telah sejalan dengan visi UBB yang telah menetapkan menjadi universitas riset. Fakultas Hukum dan Program Studi Hukum telah membuat target dan komitmen prestasi riset pada tahun 2026 yakni dengan **"Membangun Peradaban Hukum Berwawasan Lingkungan".**

Selain itu terdapat sebuah pernyataan yang menjadi ciri khas "keunggulan moral, mental dan intelektual" pada visi UBB, Fakultas Hukum dan Program Studi Hukum memiliki makna yang diatur menurut Peraturan UBB No.3 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bangka Belitung Lampiran I tentang Kebijakan SPMI UBB, sebagai berikut:

a. Kemampuan Moral adalah suatu kemampuan untuk melakukan atau bertindak dengan benar dalam menghadapi penentangan masyarakat, perasaan malu, skandal, atau keputusasaan.
b. Kemampuan Mental adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif.

c. Kemampuan Intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan, dan untuk alasan yang tepat. Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan visualisasi spasial.

3. Misi Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum , dan Program Studi Hukum

a. Misi UBB

Misi UBB adalah sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia;
b) Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang;
c) Meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program, hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat; dan
d) Memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.

b. Misi Fakultas Hukum

Misi Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

a) Mengembangkan pendidikan hukum yang unggul dan kompetitif
b) Meningkatkan riset, dan publikasi dalam pengembangan ilmu hukum.
c) Meningkatkan pengabdian dan kerjasama di bidang hukum.

c. Misi Program Studi Hukum

Misi Program Studi Hukum adalah sebagai berikut:

a) Mengembangkan pendidikan hukum yang unggul dan kompetitif
b) Meningkatkan riset, dan publikasi dalam pengembangan ilmu hukum.
c) Meningkatkan pengabdian dan kerjasama di bidang hukum.

4. Tujuan Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, dan Program Studi Hukum

a. Tujuan UBB

Tujuan UBB adalah sebagai berikut:

a) menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional;
b) menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan;
c) mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan
d) terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.

b. **Tujuan Fakultas Hukum**

Tujuan Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

a) Menghasilkan Lulusan Yang Unggul dalam Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset
b) Menghasilkan Penelitian Hukum Yang Bermanfaat dan Berimplikasi Pada Peningkatan Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional
c) Memproyeksikan Keilmuan Hukum dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Hukum di Masyarakat

c. **Tujuan Program Studi Hukum**

Tujuan Program Studi Hukum adalah sebagai berikut:

a) Menghasilkan Lulusan Yang Unggul dalam Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset
b) Menghasilkan Penelitian Hukum Yang Bermanfaat dan Berimplikasi Pada Peningkatan Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional
c) Memproyeksikan Keilmuan Hukum dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Hukum di Masyarakat

5. Nilai- Nilai Budaya Universitas

Nilai-nilai yang dianut oleh segenap sivitas akademika Universitas Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Nilai Budaya adalah sebagai berikut:

a) Rasa ingin tahu;
b) Peka akan tantangan lokal dan global;
c) Kerja keras;
d) Kreatif;
e) Inovatif;
f) Tangguh, tidak mudah menyerah;
g) Kejujuran;
h) Kesetaraan, kebersamaan;
i) Pelayanan terbaik.

E. RUMUSAN STANDAR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Program Studi menetapkan Profil Lulusan (PL), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau *Learning Outcome (LO)* dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan juga dari internal (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa). Disamping itu juga memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi, kerangka kualifikasi nasional perguruan tinggi (KKNI), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, analisis kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah keilmuan program studi, kompetensi utama lulusan program studi, kurikulum program studi sejenis, potensi sumber daya lokal dan nasional, serta budaya.

Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum dari stakeholder, alumni, serta dosen, program studi menyusun Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan, dengan memenuhi ketentuan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk Program Sarjana minimal, yakni (1) menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu seacar umum dan khusus untuk menyelesaikan masaah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; serta (2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

4.1. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah deskripsi karakter, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan oleh lulusan setelah mereka menempuh Pendidikan di program studi. Lulusan Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung memiliki kompetensi yang sesuai dengan keilmuan di bidang hukum yang berbasis moral, mental, dan intelektual, serta berorientasi pada nilai-nilai kearifan lokal. Serat lulusan Prodi Sarjana Hukum mampu mengembangkan keilmuan dan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat. Ciri khas dari luusan Prodi Sarjana Hukum memiliki daya kritis dan aktual terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan profil lulusan tersebut, lulusan Program Sarjana Hukum, memiliki peran pada dunia kerja sebagai berikut :

Tabel 4. Peran Lulusan dan Deskripsi Kemampuan Lulusan

No.	Peran Lulusan (PL)	Deskripsi Kemampuan Lulusan
PL1	Hakim	Mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi

PL2	Jaksa	Mampu sebagai penuntut umum yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di siding pengadilan dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
PL3	Advokat/Penasehat Hukum	Mampu memberikan jasa berupa konsultasi hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada klien.
PL4	Perancang Perundang-Undangan dan Kontrak	Sebagai perancang perundang-undangan dan kontrak, memiliki kemampuan untuk merancang aturan hukum baru dan kontrak yang sah. Mereka dapat bekerja di pemerintahan atau sektor swasta untuk mengembangkan kebijakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau organisasi. Kemampuan analisis hukum dan pemahaman mendalam tentang sistem hukum menjadi kunci kesuksesan lulusan Sarjana Hukum
PL5	Diplomat	Memiliki kemampuan sebagai *negotiating, representing, protecting, dan reporting* melakukan diplomasi dan menjalin hubungan dengan perwakilan negara lain pada suatu organisasi internasional. Kemampuan ini diperlukan hadir akibat gempuran globalisasi sehingga perlunya regulasi untuk menjangkau wilayah untuk perlindungan hukum negara diwakili. Mengatur terkait hak asasi manusia, perdagangan internasional, hukum organisasi internasional, hukum perjanjian internasional, hukum udara dan ruang angkasa, studi kasus hukum internasional, hukum laut internasional, hukum ekonomi

		internasional, hukum diplomatik, hingga hukum penyelesaian sengketa internasional.

a. Capaian Pembelajaran Lulusan *Learning Outcome*

Berikut merupakan tabel capaian pembelajaran lulusan *learning outcome* Program Studi S1 Hukum

Tabel 5. Capaian Pembelajaran Lulusan /*Learning Outcome*

Kode	Komponen	CPL-LO	Peran Lulusan (PL)			
			PL1	PL2	PL3	PL4
LO-01	Sikap	Mampu berperan sebagai warganegara yang cinta tanah air dan menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menerapkan nilai-nilai, norma, dan etika, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri.	√	√	√	√
LO-02	Sikap	Mampu bekerjasama dan mengembangkan jaringan dalam semangat penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau gagasan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	√	√	√	√
LO-03	Sikap	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri serta mampu bekerjasama dalam tim.	√	√	√	√
LO-04	Pengetahuan	Penguasaan konsep dan teori dalam ilmu hukum	√	√	√	√
LO-05	Pengetahuan	Kemampuan menerapkan dan keterampilan yang diperoleh dari	√	√	√	√

		perkuliahan sebelumnya dalam permasalahan yang dihadapi didunia kerja				
LO-06	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	√	√	√	√
LO-07	Keterampilan Umum	Mampu bertanggungjawab dan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur,serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah berdasarkan analisis informasi dan data terhadap kinerja mandiri ataupun kelompok;	√	√	√	√
LO-08	Keterampilan Khusus	Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum	√	√	√	√
LO-09	Keterampilan Khusus	Menguasai konsep teoretis bidang Sosiologi secara umum dan khusus, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural	√	√	√	√
LO-10	Keterampilan Khusus	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok	√	√	√	√

F. PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Tabel 6. Penetapan bahan kajian

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Bahan Kajian
LO-01	Mampu berperan sebagai warganegara yang cinta tanah air dan menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menerapkan nilai-nilai, norma, dan etika, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri.	1. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Bahasa Indonesia 3. UBB dan Keunggulan Peradaban 4. Pendidikan Agama 5. Pendidikan Pancasila 6. Bahasa Inggris 7. Hukum Pidana 8. Hukum Perdata 9. Hukum Tata Negara 10. Hukum Internasional 11. Hukum Islam 12. Hukum Agraria 13. Hukum Adat 14. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara 15. Hukum Lingkungan 16. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama 17. Hukum Pidana Korupsi 18. Hukum Perusahaan 19. Hukum Pemerintahan Daerah 20. Sistem Peradilan Pidana 21. Hukum Laut Internasional 22. Hukum Pertambangan 23. Hukum Pajak 24. Hukum Siber 25. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 26. Mata Kuliah Program Peminatan
LO-02	Mampu bekerjasama dan mengembangkan jaringan dalam semangat penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau gagasan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	1. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Bahasa Indonesia 3. UBB dan Keunggulan Peradaban 4. Pendidikan Agama 5. Pendidikan Pancasila 6. Bahasa Inggris

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Bahan Kajian
LO-03	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri serta mampu bekerjasama dalam tim.	1. Ilmu Negara 2. Pengantar Ilmu Hukum 3. Pengantar Hukum Indonesia 4. Hukum dan HAM 5. Etika dan Tanggung Jawaban Profesi 6. Hukum Administrasi Negara 7. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana 8. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata 9. Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi 10. Penyelesaian Sengketa Internasional 11. Kriminologi 12. Hukum Dagang 13. Hukum Ketenagakerjaan 14. Hukum Diplomatik dan Konsuler
LO-04	Penguasaan konsep dan teori dalam ilmu hukum	1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Pengantar Hukum Indonesia 3. Ilmu Negara 4. Hukum dan HAM 5. Hukum Pidana 6. Hukum Perdata 7. Hukum Tata Negara 8. Hukum Internasional 9. Hukum Islam 10. Hukum Administrasi Negara 11. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana 12. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata 13. Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi 14. Penyelesaian Sengketa Internasional 15. Kriminologi 16. Hukum Dagang 17. Hukum Ketenagakerjaan 18. Hukum Diplomatik dan Konsuler 19. Hukum Agraria 20. Hukum Adat 21. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara 22. Hukum Lingkungan

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Bahan Kajian
		23. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama 24. Hukum Pidana Korupsi 25. Hukum Perusahaan 26. Hukum Pemerintahan Daerah 27. Sistem Peradilan Pidana 28. Hukum Laut Internasional 29. Filsafat Hukum 30. Ilmu dan Teknik Perancangan Perundang-Undangan 31. Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak 32. Hukum Humaniter 33. Hukum Kemaritiman 34. Hak Kekayaan Intelektual 35. Delik-Delik Dalam KUHP 36. Hukum Pertambangan 37. Hukum Pajak 38. Hukum Siber 39. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 40. Mata Kuliah Program Peminatan (PP)
LO-05	Kemampuan menerapkan dan keterampilan yang diperoleh dari perkuliahan sebelumnya dalam permasalahan yang dihadapi didunia kerja	1. Etika dan Tanggung Jawaban Profesi 2. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana 3. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata 4. Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi 5. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara 6. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama 7. Ilmu dan Teknik Perancangan Perundang-Undangan 8. Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak 9. Bahasa Indonesia 10. Bahasa Inggris
LO-06	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	1. Hukum Humaniter 2. Hukum Kemaritiman 3. Hak Kekayaan Intelektual 4. Delik-Delik Dalam KUHP 5. Hukum Pertambangan 6. Mata Kuliah Program Peminatan

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Bahan Kajian
LO-07	Mampu bertanggungjawab dan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur,serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah berdasarkan analisis informasi dan data terhadap kinerja mandiri ataupun kelompok;	1. Hukum Pidana 2. Hukum Perdata 3. Hukum Tata Negara 4. Hukum Internasional 5. Hukum Islam 6. Hukum Administrasi Negara 7. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana 8. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata 9. Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi 10. Penyelesaian Sengketa Internasional 11. Kriminologi 12. Hukum Dagang 13. Hukum Ketenagakerjaan 14. Hukum Diplomatik dan Konsuler 15. Hukum Pajak 16. Hukum Siber 17. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 18. Proposal 19. Skripsi 20. Alternatif Penyelesaian Sengketa 21. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam 22. Hukum Administrasi Daerah 23. Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara 24. Hukum Pengelolaan Energi 25. Diskresi dan Beleidsregel 26. Hukum Kepegawaian 27. Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah 28. Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif HTN 29. Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
LO-08	Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum	1. Ilmu Negara 2. Pengantar Ilmu Hukum 3. Pengantar Hukum Indonesia 4. Hukum dan HAM 5. Etika dan Tanggung Jawaban Profesi 6. Hukum Agraria 7. Hukum Adat 8. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Bahan Kajian
		9. Hukum Lingkungan 10. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama 11. Hukum Pidana Korupsi 12. Hukum Perusahaan 13. Hukum Pemerintahan Daerah 14. Sistem Peradilan Pidana 15. Hukum Laut Internasional 16. Hukum Humaniter 17. Hukum Kemaritiman 18. Hak Kekayaan Intelektual 19. Delik-Delik Dalam KUHP 20. Hukum Pertambangan 21. Hukum Pembuktian 22. Logika Hukum 23. Psikologi Hukum 24. Penelusuran Literatur Hukum 25. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan 26. Hukum Kondominium 27. Analisis Dampak Lingkungan 28. Pemberdayaan Hukum Masyarakat 29. Perlindungan Disabilitas 30. Hukum Pariwisata 31. Hukum Pendaftaran Tanah 32. Hukum Pidana Lingkungan 33. Pengantar Statistika 34. Hukum Kawasan Pesisir 35. Penemuan Hukum 36. Hukum Transportasi 37. Hukum Perlindungan Nelayan 38. Proposal Skripsi 39. Skripsi
LO-09	Menguasai konsep teoretis bidang Sosiologi secara umum dan khusus, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural	1. Hukum Pembuktian 2. Logika Hukum 3. Psikologi Hukum 4. Penelusuran Literatur Hukum 5. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan 6. Sosiologi Hukum 7. Antropologi Hukum 8. Hukum Imigrasi 9. Arbitrase 10. Hukum Kelautan dan Perikanan 11. Reforma Agraria 12. Penyelesaian Delik Adat

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Bahan Kajian
LO-10	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok	1. Mata Kuliah Program Peminatan 2. Alternatif Penyelesaian Sengketa 3. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam 4. Hukum Administrasi Daerah 5. Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara 6. Hukum Pengelolaan Energi 7. Diskresi dan Beleidsregel 8. Hukum Kepegawaian 9. Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah 10. Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif HTN 11. Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 12. Analisis Hukum dan Sosial 13. Hukum Pengawasan Aparatur Sipil Negara 14. Legal Momerandum dan Studi Kasus 15. Eksaminasi dan Legal Opinion 16. Hukum dan Partisipasi Publik 17. Analisis Data Penelitian 18. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 19. Teknik Wawancara Responden 20. Teknik Penentuan Isu Penelitian Hukum 21. Teknik Publikasi Artikel Ilmiah 22. Hukum Kondominium 23. Analisis Dampak Lingkungan 24. Pemberdayaan Hukum Masyarakat 25. Perlindungan Disabilitas 26. Hukum Pariwisata 27. Hukum Pendaftaran Tanah 28. Hukum Pidana Lingkungan 29. Pengantar Statistika 30. Hukum Kawasan Pesisir 31. Penemuan Hukum 32. Hukum Transportasi 33. Hukum Perlindungan Nelayan

G. KEUNIKAN PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FH UBB

Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) memiliki keunikan akademik yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan nilai-nilai lokal Bangka Belitung. Keunikan ini mencerminkan karakteristik wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya pertambangan timah, ekosistem pesisir dan laut, serta keragaman sosial dan budaya masyarakat.

Karakteristik tersebut dikembangkan melalui integrasi perspektif hukum lingkungan, hukum sumber daya alam, hukum pertambangan, hukum kelautan dan pesisir, serta kearifan lokal dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, pembelajaran hukum tidak hanya berorientasi pada penguasaan norma dan teori hukum, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang berkembang di masyarakat Bangka Belitung.

H. PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS

Bahan Kajian ditentukan kemudian Bahan Kajian dikelompokkan sesuai dengan *body of knowledge*. Beberapa bahan kajian yang bersilangan diantara LO-01 hingga LO-10 digabung menjadi satu kelompok, kemudian ditentukan bobotnya. Setelah diketahui bobot setiap bahan kajian, kemudian disusunlah mata kuliah yang besarannya disesuaikan dengan bobot yang diperlukan.

Penentuan bobot bahan kajian disesuaikan dengan kebutuhan bahan kajian melalui evaluasi pada program studi dan juga dapat mengacu pada asosiasi program studi sejenis. Berikut ini kelompok bahan kajian Program Studi **Ilmu Hukum** :

1. Mata kuliah umum universitas
2. Mata kuliah fakultas
3. Bahan kajian hukum pidana
4. Bahan kajian hukum perdata
5. Bahan kajian hukum tata negara
6. Bahan kajian hukum internasional

Berikutnya dibuatlah tabel matrik antara CPL, Bahan Kajian, dan Bobot Mata Kuliah yang dapat dilihat pada tabel 7.

Berikut ini adalah contoh matrik antara CPL/LO dengan Bahan Kajian dan Bobot

Tabel 7. Matrik CPL, Bahan Kajian, dan Bobot

No.	Kelompok Bahan Kajian	Bahan Kajian	Bobot (Menit)	Mata Kuliah	SKS
1	Mata Kuliah Umum Universitas dan Fakultas	Pendidikan Kewarganegaraan	5400	Pendidikan Kewarganegaraan	2 (2-0)
		Muatan Lokal Universitas	5400	Bahasa Indonesia	2 (2-0)
			5400	UBB dan Keunggulan Peradaban	2 (2-0)
		Ilmu Negara	5400	Ilmu Negara	2 (2-0)
		Pengantar Ilmu Hukum	10800	Pengantar Ilmu Hukum	4 (4-0)
		Pengantar Hukum Indonesia	10800	Pengantar Hukum Indonesia	4 (4-0)
		Hukum dan HAM	5400	Hukum dan HAM	2 (2-0)
		Etika dan Tanggung Jawaban Profesi	5400	Etika dan Tanggung Jawaban Profesi	2 (2-0)
		Skripsi	16200	Skripsi	6
2	Mata Kuliah Umum Universitas dan Fakultas	Pendidikan Agama	5400	Pendidikan Agama	2 (2-0)
		Pendidikan Pancasila	5400	Pendidikan Pancasila	2 (2-0)
		Muatan Lokal Universitas	5400	Bahasa Inggris	2 (2-0)
		Hukum Pidana	8100	Hukum Pidana	3 (3-0)
		Hukum Perdata	8100	Hukum Perdata	3 (3-0)
		Hukum Tata Negara	8100	Hukum Tata Negara	3 (3-0)
		Hukum Internasional	8100	Hukum Internasional	3 (3-0)
		Hukum Islam	5400	Hukum Islam	2 (2-0)
3	Mata Kuliah Fakultas	Hukum Administrasi Negara	8100	Hukum Administrasi Negara	3 (3-0)
		Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana	8100	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana	3 (2-1)
		Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata	8100	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata	3 (2-1)

		Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi	8100	Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi	3 (2-1)
		Penyelesaian Sengketa Internasional	5400	Penyelesaian Sengketa Internasional	2 (2-0)
		Delik-Delik Dalam KUHP	5400	Kriminologi	2 (2-0)
		Hukum Dagang	8100	Hukum Dagang	3 (3-0)
		Hukum Ketenagakerjaan	5400	Hukum Ketenagakerjaan	2 (2-0)
		Hukum Diplomatik dan Konsuler	5400	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2 (2-0)
4	Mata Kuliah Fakultas	Hukum Agraria	8100	Hukum Agraria	3 (3-0)
		Hukum Adat	8100	Hukum Adat	3 (3-0)
		Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	8100	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	3 (2-1)
		Hukum Lingkungan	5400	Hukum Lingkungan	2 (2-0)
		Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama	5400	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama	2 (2-0)
		Hukum Pidana Korupsi	5400	Hukum Pidana Korupsi	2 (2-0)
		Hukum Perusahaan	5400	Hukum Perusahaan	2 (2-0)
		Hukum Pemerintahan Daerah	5400	Hukum Pemerintahan Daerah	2 (2-0)
		Sistem Peradilan Pidana	5400	Sistem Peradilan Pidana	2 (2-0)
		Hukum Laut Internasional	5400	Hukum Laut Internasional	2 (2-0)
5	Mata Kuliah Fakultas	Filsafat Hukum	5400	Filsafat Hukum	2 (2-0)
		Ilmu dan Teknik Perancangan Perundang-Undangan	5400	Ilmu dan Teknik Perancangan Perundang-Undangan	2 (2-0)
		Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak	5400	Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak	2 (2-0)
		Hukum Humaniter	5400	Hukum Humaniter	2 (2-0)
		Hukum Kemaritiman	5400	Hukum Kemaritiman	2 (2-0)
		Hak Kekayaan Intelektual	5400	Hak Kekayaan Intelektual	2 (2-0)
		Kriminologi	5400	Delik-Delik Dalam KUHP	2 (2-0)
		Hukum Pertambangan	5400	Hukum Pertambangan	2 (2-0)

		Mata Kuliah Program Peminatan (PP)	16200	Mata Kuliah Program Peminatan (PP)	6 (6-0)
6	Mata Kuliah Fakultas	Hukum Pajak	5400	Hukum Pajak	2 (2-0)
		Hukum Siber	5400	Hukum Siber	2 (2-0)
		Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	5400	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2 (2-0)
		Mata Kuliah Program Peminatan (PP)	16200	Mata Kuliah Program Peminatan (PP)	6 (6-0)
7	Mata Kuliah Fakultas/Konversi	Alternatif Penyelesaian Sengketa	5400	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2 (2-0)
		Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam	5400	Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam	2 (2-0)
		Hukum Administrasi Daerah	5400	Hukum Administrasi Daerah	2 (2-0)
		Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara	5400	Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara	2 (2-0)
		Hukum Pengelolaan Energi	5400	Hukum Pengelolaan Energi	2 (2-0)
		Diskresi dan Beleidsregel	5400	Diskresi dan Beleidsregel	2 (2-0)
		Hukum Kepegawaian	5400	Hukum Kepegawaian	2 (2-0)
		Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah	5400	Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah	2 (2-0)
		Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif HTN	5400	Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif HTN	2 (2-0)
		Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	5400	Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	2 (2-0)
		Hukum Pembuktian	5400	Hukum Pembuktian	2 (2-0)
		Logika Hukum	5400	Logika Hukum	2 (2-0)
		Psikologi Hukum	5400	Psikologi Hukum	2 (2-0)
		Penelusuran Literatur Hukum	5400	Penelusuran Literatur Hukum	2 (2-0)
		Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	5400	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	2 (2-0)
		Sosiologi Hukum	5400	Sosiologi Hukum	2 (2-0)
		Antropologi Hukum	5400	Antropologi Hukum	2 (2-0)
		Hukum Imigrasi	5400	Hukum Imigrasi	2 (2-0)

		Arbitrase	5400	Arbitrase	2 (2-0)
		Hukum Kelautan dan Perikanan	5400	Hukum Kelautan dan Perikanan	2 (2-0)
		Reforma Agraria	5400	Reforma Agraria	2 (2-0)
		Penyesaian Delik Adat	5400	Penyesaian Delik Adat	2 (2-0)
		Analisis Hukum dan Sosial	5400	Analisis Hukum dan Sosial	2 (2-0)
		Hukum Pengawasan Aparatur Sipil Negara	5400	Hukum Pengawasan Aparatur Sipil Negara	2 (2-0)
		Legal Momerandum dan Studi Kasus	5400	Legal Momerandum dan Studi Kasus	2 (2-0)
		Eksaminasi dan Legal Opinion	5400	Eksaminasi dan Legal Opinion	2 (2-0)
		Hukum dan Partisipasi Publik	5400	Hukum dan Partisipasi Publik	2 (2-0)
		Analisis Data Penelitian	5400	Analisis Data Penelitian	2 (2-0)
		Teknik Pengumpulan Data Penelitian	5400	Teknik Pengumpulan Data Penelitian	2 (2-0)
		Teknik Wawancara Responden	5400	Teknik Wawancara Responden	2 (2-0)
		Teknik Penentuan Isu Penelitian Hukum	5400	Teknik Penentuan Isu Penelitian Hukum	2 (2-0)
		Teknik Publikasi Artikel Ilmiah	5400	Teknik Publikasi Artikel Ilmiah	2 (2-0)
		Hukum Kondominium	5400	Hukum Kondominium	2 (2-0)
		Analisis Dampak Lingkungan	5400	Analisis Dampak Lingkungan	2 (2-0)
		Pemberdayaan Hukum Masyarakat	5400	Pemberdayaan Hukum Masyarakat	2 (2-0)
		Perlindungan Disabilitas	5400	Perlindungan Disabilitas	2 (2-0)
		Hukum Pariwisata	5400	Hukum Pariwisata	2 (2-0)
		Hukum Pendaftaran Tanah	5400	Hukum Pendaftaran Tanah	2 (2-0)
		Hukum Pidana Lingkungan	5400	Hukum Pidana Lingkungan	2 (2-0)
		Pengantar Statistika	5400	Pengantar Statistika	2 (2-0)
		Hukum Kawasan Pesisir	5400	Hukum Kawasan Pesisir	2 (2-0)
		Penemuan Hukum	5400	Penemuan Hukum	2 (2-0)
		Hukum Transportasi	5400	Hukum Transportasi	2 (2-0)
		Hukum Perlindungan Nelayan	5400	Hukum Perlindungan Nelayan	2 (2-0)

8	Mata Kuliah Fakultas	Proposal Skripsi	5400	Proposal Skripsi	2 (2-0)
9	Mata Kuliah Fakultas/Program Peminatan Keperdataan	Hukum Keluarga dan Waris	5400	Hukum Keluarga dan Waris	2 (2-0)
		Hukum Jaminan	5400	Hukum Jaminan	2 (2-0)
		Hukum Surat Berharga	5400	Hukum Surat Berharga	2 (2-0)
		Hukum Perlindungan Konsumen	5400	Hukum Perlindungan Konsumen	2 (2-0)
		Hukum Persaingan Usaha	5400	Hukum Persaingan Usaha	2 (2-0)
		Hukum Kepailitan	5400	Hukum Kepailitan	2 (2-0)
		Hukum Investasi dan Pasar Modal	5400	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2 (2-0)
		Hukum Asuransi	5400	Hukum Asuransi	2 (2-0)
		Kapita Selekta Hukum Perdata	5400	Kapita Selekta Hukum Perdata	2 (2-0)
		Hukum Ekonomi Islam	5400	Hukum Ekonomi Islam	2 (2-0)
10	Mata Kuliah Fakultas/Program Peminatan Pidana	Penologi	5400	Penologi	2 (2-0)
		Tindak Pidana Khusus	5400	Tindak Pidana Khusus	2 (2-0)
		Perbandingan Hukum Pidana	5400	Perbandingan Hukum Pidana	2 (2-0)
		Politik Hukum Pidana	5400	Politik Hukum Pidana	2 (2-0)
		Hukum Kedokteran Forensik	5400	Hukum Kedokteran Forensik	2 (2-0)
		Hukum Peradilan Anak	5400	Hukum Peradilan Anak	2 (2-0)
		Viktimologi	5400	Viktimologi	2 (2-0)
		Hukum Pidana Ekonomi	5400	Hukum Pidana Ekonomi	2 (2-0)
		Hukum Pidana Korupsi	5400	Hukum Pidana Korporasi	2 (2-0)
		Kapita Selekta Hukum Pidana	5400	Kapita Selekta Hukum Pidana	2 (2-0)
11	Mata Kuliah Fakultas/Program	Hukum Lembaga-Lembaga Negara	5400	Hukum Lembaga-Lembaga Negara	2 (2-0)

	Peminatan Hukum Tata Negara	Hukum Tata Ruang	5400	Hukum Tata Ruang	2 (2-0)
		Hukum Keuangan Negara	5400	Hukum Keuangan Negara	2 (2-0)
		Perbandingan HTN	5400	Perbandingan HTN	2 (2-0)
		Hukum Perizinan	5400	Hukum Perizinan	2 (2-0)
		Hukum Pemilu dan Kepartaian	5400	Hukum Pemilu dan Kepartaian	2 (2-0)
		Hukum Kebijakan Publik dan Layanan Publik	5400	Hukum Kebijakan Publik dan Layanan Publik	2 (2-0)
		Hukum Kesehatan	5400	Hukum Kesehatan	2 (2-0)
		Kapita Selekta HTN	5400	Kapita Selekta HTN	2 (2-0)
		Hukum Perkebunan dan Kehutanan	5400	Hukum Perkebunan dan Kehutanan	2 (2-0)
12	Mata Kuliah Fakultas/Program Peminatan Hukum Internasional	Hukum Perusahaan Trans Nasional	5400	Hukum Perburuhan Internasional	2 (2-0)
		Hukum Pidana Internasional	5400	Hukum Perjanjian Internasional	2 (2-0)
		Hukum Organisasi Internasional	5400	Hukum Pengungsi Internasional	2 (2-0)
		Hukum Perjanjian Internasional	5400	Hukum Organisasi Internasional	2 (2-0)
		Hukum Perburuhan Internasional	5400	Hukum Pidana Internasional	2 (2-0)
		Hukum Udara dan Ruang Angkasa	5400	Hukum Ekonomi Internasional	2 (2-0)
		Hukum Pengungsi	5400	Hukum Perdagangan Internasional	2 (2-0)
		Hukum Ekonomi Internasional	5400	Hukum Perusahaan Transnasional	2 (2-0)
		Hukum Lingkungan Internasional	5400	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2 (2-0)
		Hukum Perdagangan Internasional	5400	Hukum Lingkungan Internasional	2 (2-0)

- *1 sks = 45 jam = 2700 menit (tatap muka, tugas terstruktur, dan kerja mandiri)*

Kemudian mata kuliah yang telah ditetapkan dibuatlah matrik kesesuaian antara mata kuliah dan CPL/LO dengan uraian tabel berikut:

Tabel 8. Matrik Mata kuliah dengan CPL/LO

No	Mata Kuliah	Kode	SKS	CPL/LO									
				LO-01	LO-02	LO-03	LO-04	LO-05	LO-06	LO-07	LO-08	LO-09	LO-10
Semester I													
1	Pendidikan Kewarganegaraan		2 (2-0)	√	√								
	Bahasa Indonesia		2 (2-0)	√	√			√					
	UBB dan Keunggulan Peradaban		2 (2-0)	√	√								
	Ilmu Negara		2 (2-0)			√	√				√		
	Pengantar Ilmu Hukum		4 (4-0)			√	√				√		
	Pengantar Hukum Indonesia		4 (4-0)			√	√				√		
	Hukum dan HAM		2 (2-0)			√	√				√		
	Etika dan Tanggung Jawaban Profesi		2 (2-0)			√		√			√		
Semester II													
2	Pendidikan Agama		2 (2-0)	√	√								
	Pendidikan Pancasila		2 (2-0)	√	√								
	Bahasa Inggris		2 (2-0)	√	√			√					
	Hukum Pidana		3 (3-0)	√			√			√			
	Hukum Perdata		3 (3-0)	√			√			√			
	Hukum Tata Negara		3 (3-0)	√			√			√			
	Hukum Internasional		3 (3-0)	√			√			√			
	Hukum Islam		2 (2-0)	√			√			√			
Semester III													
3	Hukum Administrasi Negara		3 (3-0)			√	√			√			
	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana		3 (2-1)			√	√	√		√			

	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata		3 (2-1)			√	√	√		√			
	Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi		3 (2-1)			√	√	√		√			
	Penyelesaian Sengketa Internasional		2 (2-0)			√	√			√			
	Delik-Delik Dalam KUHP		2 (2-0)			√	√			√			
	Hukum Dagang		3 (3-0)			√	√			√			
	Hukum Ketenagakerjaan		2 (2-0)			√	√			√			
	Hukum Diplomatik dan Konsuler		2 (2-0)			√	√			√			
Semester IV													
	Hukum Agraria		3 (3-0)	√			√				√		
	Hukum Adat		3 (3-0)	√			√				√		
	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara		3 (2-1)	√			√	√			√		
	Hukum Lingkungan		2 (2-0)	√			√				√		
4	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama		2 (2-0)	√			√	√			√		
	Hukum Pidana Korupsi		2 (2-0)	√			√				√		
	Hukum Perusahaan		2 (2-0)	√			√				√		
	Hukum Pemerintahan Daerah		2 (2-0)	√			√				√		
	Sistem Peradilan Pidana		2 (2-0)	√			√				√		
	Hukum Laut Internasional		2 (2-0)	√			√				√		
Semester V													
	Filsafat Hukum		2 (2-0)				√						
	Ilmu dan Teknik Perancangan Perundang-Undangan		2 (2-0)				√	√					
5	Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak		2 (2-0)				√	√					
	Hukum Humaniter		2 (2-0)				√		√		√		
	Hukum Kemaritiman		2 (2-0)				√		√		√		
	Hak Kekayaan Intelektual		2 (2-0)				√		√		√		

	Kriminologi		2 (2-0)				√		√		√		
	Hukum Pertambangan		2 (2-0)	√			√		√		√		
	Mata Kuliah Program Peminatan (PP)		6 (6-0)	√			√		√				√
Semester VI													
6	Hukum Pajak		2 (2-0)	√			√			√			
	Hukum Siber		2 (2-0)	√			√			√			
	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum		2 (2-0)	√			√			√			
	Mata Kuliah Program Peminatan (PP)		6 (6-0)	√			√		√				√
Semester VII/Mata Kuliah Konversi													
7	Alternatif Penyelesaian Sengketa		2 (2-0)							√			√
	Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam		2 (2-0)							√			√
	Hukum Administrasi Daerah		2 (2-0)							√			√
	Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara		2 (2-0)							√			√
	Hukum Pengelolaan Energi		2 (2-0)							√			√
	Diskresi dan Beleidsregel		2 (2-0)							√			√
	Hukum Kepegawaian		2 (2-0)							√			√
	Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah		2 (2-0)							√			√
	Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif HTN		2 (2-0)							√			√
	Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)		2 (2-0)							√			√
	Hukum Pembuktian		2 (2-0)								√	√	
	Logika Hukum		2 (2-0)								√	√	
	Psikologi Hukum		2 (2-0)								√	√	
	Penelusuran Literatur Hukum		2 (2-0)								√	√	
	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan		2 (2-0)								√	√	
	Antropologi Hukum		2 (2-0)									√	

Hukum Imigrasi		2 (2-0)									√	
Arbitrase		2 (2-0)									√	
Hukum Kelautan dan Perikanan		2 (2-0)									√	
Reforma Agraria		2 (2-0)									√	
Penyesaian Delik Adat		2 (2-0)									√	
Analisis Hukum dan Sosial		2 (2-0)										√
Hukum Pengawasan Aparatur Sipil Negara		2 (2-0)										√
Legal Momerandum dan Studi Kasus		2 (2-0)										√
Eksaminasi dan Legal Opinion		2 (2-0)										√
Hukum dan Partisipasi Publik		2 (2-0)										√
Analisis Data Penelitian		2 (2-0)										√
Teknik Pengumpulan Data Penelitian		2 (2-0)										√
Teknik Wawancara Responden		2 (2-0)										√
Teknik Penentuan Isu Penelitian Hukum		2 (2-0)										√
Teknik Publikasi Artikel Ilmiah		2 (2-0)										√
Hukum Kondominium		2 (2-0)								√		√
Analisis Dampak Lingkungan		2 (2-0)								√		√
Pemberdayaan Hukum Masyarakat		2 (2-0)								√		√
Perlindungan Disabilitas		2 (2-0)								√		√
Hukum Pariwisata		2 (2-0)								√		√
Hukum Pendaftaran Tanah		2 (2-0)								√		√
Hukum Pidana Lingkungan		2 (2-0)								√		√
Pengantar Statistika		2 (2-0)								√		√
Hukum Kawasan Pesisir		2 (2-0)								√		√
Penemuan Hukum		2 (2-0)								√		√
Hukum Transportasi		2 (2-0)								√		√
Hukum Perlindungan Nelayan		2 (2-0)								√		√

Semester VII													
8	Proposal Skripsi		2 (2-0)							√	√		
	Skripsi		6 (2-0)							√	√		
Mata Kuliah Program Peminatan Hukum Keperdataan													
9	Hukum Keluarga dan Waris		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Jaminan		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Surat Berharga		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Perlindungan Konsumen		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Persaingan Usaha		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Kepailitan		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Investasi dan Pasar Modal		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Asuransi		2 (2-0)	√			√		√				√
	Kapita Selekta Hukum Perdata		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Ekonomi Islam		2 (2-0)	√			√		√				√
Mata Kuliah Program Peminatan Hukum Pidana													
10	Penologi		2 (2-0)	√			√		√				√
	Tindak Pidana Khusus		2 (2-0)	√			√		√				√
	Perbandingan Hukum Pidana		2 (2-0)	√			√		√				√
	Politik Hukum Pidana		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Kedokteran Forensik		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Peradilan Anak		2 (2-0)	√			√		√				√
	Viktimologi		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Pidana Ekonomi		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Pidana Korporasi		2 (2-0)	√			√		√				√
	Kapita Selekta Hukum Pidana		2 (2-0)	√			√		√				√

Mata Kuliah Program Peminatan Hukum Tata Negara													
11	Hukum Lembaga-Lembaga Negara		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Kesehatan		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Keuangan Negara		2 (2-0)	√			√		√				√
	Perbandingan HTN		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Perizinan		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Pemilu dan Kepartaian		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Kebijakan Publik dan Layanan Publik		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Tata Ruang		2 (2-0)	√			√		√				√
	Kapita Selekta HTN		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Perkebunan dan Kehutanan		2 (2-0)	√			√		√				√
Mata Kuliah Program Peminatan Hukum Internasional													
12	Hukum Perusahaan Trans Nasional		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Pidana Internasional		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Organisasi Internasional		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Perjanjian Internasional		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Perburuhan Internasional		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Udara dan Ruang Angkasa		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Pengungsi		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Ekonomi Internasional		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Lingkungan Internasional		2 (2-0)	√			√		√				√
	Hukum Perdagangan Internasional		2 (2-0)	√			√		√				√

I. MATRIKS DAN PETA KURIKULUM

1. Matrik mata kuliah/Blok

Tabel 9. Matriks organisasi mata kuliah/Blok

Jumlah SKS	Jumlah Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah Prodi Sarjana			
		MK Wajib	MK Fakultas	MKWU	MK PIL
8	2		Proposal	Skripsi	
20	44				Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Hukum Administrasi Daerah Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara Hukum Pengelolaan Energi Diskresi dan Beleidsregel Hukum Kepegawaian Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif HTN Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Hukum Pembuktian Logika Hukum Psikologi Hukum Penelusuran Literatur Hukum Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Antropologi Hukum Hukum Imigrasi Arbitrase

					Hukum Kelautan dan Perikanan
					Reforma Agraria
					Penyesaian Delik Adat
					Analisis Hukum dan Sosial
					Hukum Pengawasan Aparatur Sipil Negara
					Legal Momerandum dan Studi Kasus
					Eksaminasi dan Legal Opinion
					Hukum dan Partisipasi Publik
					Analisis Data Penelitian
					Teknik Pengumpulan Data Penelitian
					Teknik Wawancara Responden
					Teknik Penentuan Isu Penelitian Hukum
					Teknik Publikasi Artikel Ilmiah
					Hukum Kondominium
					Analisis Dampak Lingkungan
					Pemberdayaan Hukum Masyarakat
					Perlindungan Disabilitas
					Hukum Pariwisata
					Hukum Pendaftaran Tanah
					Hukum Pidana Lingkungan
					Pengantar Statistika
					Hukum Kawasan Pesisir
					Penemuan Hukum
					Hukum Transportasi
					Hukum Perlindungan Nelayan
12	6	Hukum Pajak			Hukum Kepailitan
		Hukum Siber			Hukum Kepailitan

		Metode Penelitian dan Penulisan Hukum			Hukum Investasi dan Pasar Modal
					Hukum Pengangkutan
					Kapita Selekta Hukum Perdata
					Hukum Ekonomi Islam
					Hukum Peradilan Anak
					Viktimologi
					Hukum Pidana Ekonomi
					Hukum Pidana Korporasi
					Kapita Selekta Hukum Pidana
					Hukum Pemilu dan Kepartaian
					Hukum Kebijakan Publik dan Layanan Publik
					Hukum Kesehatan
					Kapita Selekta HTN
					Hukum Perkebunan dan Kehutanan
					Hukum Perdagangan Internasional
					Hukum Ekonomi Internasional
					Hukum Udara dan Ruang Angkasa
					Hukum Perusahaan Transnasional
22	9	Filsafat Hukum			Hukum Keluarga dan Waris
		Ilmu dan Teknik Perancangan Perundang-Undangan			Hukum Jaminan
		Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak			Hukum Surat Berharga
		Hukum Humaniter			Hukum Perlindungan Konsumen
		Hukum Kemaritiman			Hukum Persaingan Usaha

		Hak Kekayaan Intelektual			Penologi
		Kriminologi			Tindak Pidana Khusus
		Hukum Pertambangan			Perbandingan Hukum Pidana
					Politik Hukum Pidana
					Hukum Kedokteran Forensik
					Hukum Lembaga-Lembaga Negara
					Hukum Tata Ruang
					Hukum Keuangan Negara
					Perbandingan HTN
					Hukum Perizinan
					Hukum Perburuhan Internasional
					Hukum Perjanjian Internasional
					Hukum Organisasi Internasional
					Hukum Pengungsi Internasional
					Hukum Pidana Internasional
23	10	Hukum Agraria			
		Hukum Adat			
		Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara			
		Hukum Lingkungan			
		Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama			
		Hukum Pidana Korupsi			
		Hukum Perusahaan			
		Hukum Pemerintahan Daerah			
		Sistem Peradilan Pidana			

		Hukum Laut Internasional			
23	9	Hukum Administrasi Negara Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi Penyelesaian Sengketa Internasional Delik-Delik Dalam KUHP Hukum Dagang Hukum Ketenagakerjaan Hukum Diplomatik dan Konsuler			
20	8	Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Internasional Hukum Islam		Pendidikan Agama Pendidikan Pancasila Bahasa Inggris	
20	8	Ilmu Negara Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia Hukum dan HAM		Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia UBB dan Keunggulan Peradaban	

		Etika dan Tanggung Jawaban Profesi			

Pembagian Mata kuliah Wajib Universitas (berdasarkan SK Rektor Nomor 2.28/UN50/SP/XII/2020) dapat mengacu ke tabel berikut:

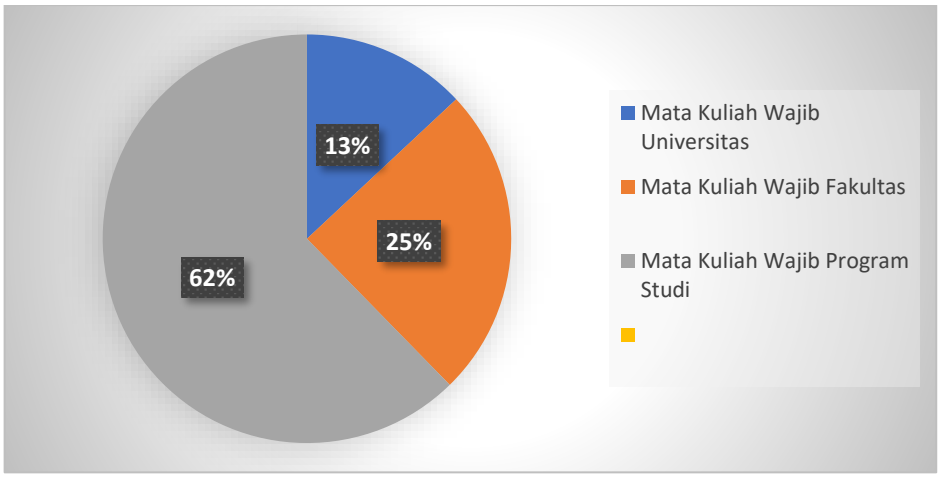
No	Nama Mata Kuliah	Semester I			Semester 2			Semester 8
1	Pendidikan Agama	FEB	FST	-	FH	FISIP	FPPK	-
2	Pendidikan Pancasila							
3	Pendidikan Kewarganegaraan							
4	Bahasa Indonesia	FH	FISIP	FPPK	FEB	FST	-	-
5	Bahasa Inggris							
6	UBB dan Keuanggulan Peradaban							
7	Skripsi	-	-	-	-	-	-	Semua Fakultas

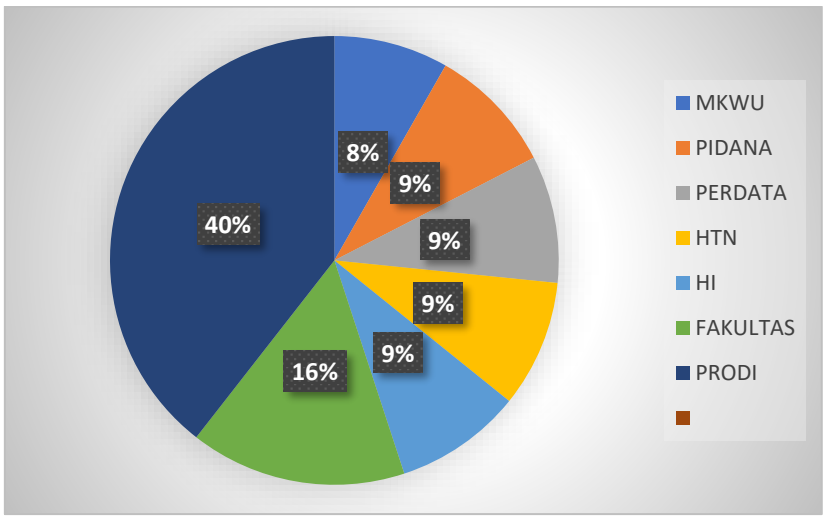
J. STRUKTUR KURIKULUM

1. Komposisi Kurikulum

Untuk menyelesaikan program akademik Sarjana Program Studi hukum adalah harus lulus minimal 144 SKS. Terdiri dari Matakuliah MKWU 12 SKS, mata kuliah wajib Fakultas 34 SKS, mata kuliah wajib Prodi 86 SKS dan mata kuliah Pilihan/Konsentrasi sekitar 12 SKS dengan komposisi dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut

Gambar 1. Komposisi Kurikulum Program Studi Hukum





Gambar 2. Presentasi Sebaran Mata Kuliah berdasarkan Kelompok Bahan Kajian

2. Pengkodean Mata Kuliah

Berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 pasal 4 mengatur tentang Kode Mata Kuliah, sebagai berikut:

(1) Kode mata kuliah terdiri atas 3 huruf dan 3-digit angka;

(2) Kode mata kuliah memuat:

a. Tiga huruf pertama menunjukkan kode Universitas/Fakultas/Pasca Sarjana/Jurusan/Program Studi;
b. Satu digit angka pertama menunjukkan tahun;
c. Dua digit terakhir menunjukkan urutan mata kuliah

Contoh:

a. UBB101
   UBB = kode universitas,
   1 = mata kuliah diberikan pada tahun pertama,
   01 = mata kuliah nomor urut 1

b. HKM202
   HKM = kode Fakultas Hukum
   2 = mata kuliah diberikan pada tahun kedua
   02 = mata kuliah nomor urut 2

c. HPD305
   HPD = kode Peminatan Pidana
   5 = mata kuliah diberikan pada tahun kelima
   03 = mata kuliah nomor urut 3

d. HPR305
   HPR = kode Peminatan Perdata
   5 = mata kuliah diberikan pada tahun kelima
   03 = mata kuliah nomor urut 3

e. HTN
   HTN = kode Peminatan Pidana
   5 = mata kuliah diberikan pada tahun kelima
   03 = mata kuliah nomor urut 3

f. HI
   HIL = kode Peminatan Pidana
   5 = mata kuliah diberikan pada tahun kelima
   03 = mata kuliah nomor urut 3

3. Daftar Sebaran Mata Kuliah Persemester

Tabel 10. Mata Kuliah di Semester I

No.	Kelompok	Kode	MATA KULIAH	SKS	Semester	Prasyarat
1	MKWU	UBB 103	Pendidikan Kewarganegaraan	2 (2-0)	1	
2	MKWU	UBB 105	Bahasa Indonesia	2 (2-0)	1	
3	MKWU	UBB 108	UBB dan Keunggulan Peradaban	2 (2-0)	1	
4	MKWP	HKM 101	Ilmu Negara	2 (2-0)	1	
5	MKWP	HKM 102	Pengantar Ilmu Hukum	4 (4-0)	1	
6	MKWP	HKM 103	Pengantar Hukum Indonesia	4 (4-0)	1	

7	MKWP	HKM 104	Hukum dan HAM	2 (2-0)	1	
8	MKWP	HKM 105	Etika dan Tanggung Jawaban Profesi	2 (2-0)	1	
			Total	**20**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
9	MKWU	UBB 101	Pendidikan Agama	2 (2-0)	2	
10	MKWU	UBB 102	Pendidikan Pancasila	2 (2-0)	2	
11	MKWU	UBB 104	Bahasa Inggris	2 (2-0)	2	
12	MKWP	HKM 206	Hukum Pidana	3 (3-0)	2	
13	MKWP	HKM 207	Hukum Perdata	3 (3-0)	2	Lulus PIH dan PHI
14	MKWP	HKM 208	Hukum Tata Negara	3 (3-0)	2	Lulus PIH dan PHI
15	MKWP	HKM 209	Hukum Internasional	3 (3-0)	2	Lulus PIH dan PHI
16	MKWP	HKM 210	Hukum Islam	2 (2-0)	2	
			Total	**20**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
17	MKWP	HKM 311	Hukum Administrasi Negara	3 (3-0)	3	
18	MKWP	HKM 312	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana	3 (2-1)	3	
19	MKWP	HKM 313	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata	3 (2-1)	3	
20	MKWP	HKM 314	Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi	3 (2-1)	3	
21	MKWP	HKM 315	Penyelesaian Sengketa Internasional	2 (2-0)	3	
22	MKWP	HKM 316	Delik-Delik Dalam KUHP	2 (2-0)	3	
23	MKWP	HKM 317	Hukum Dagang	3 (3-0)	3	
24	MKWP	HKM 318	Hukum Ketenagakerjaan	2 (2-0)	3	
25	MKWP	HKM 319	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2 (2-0)	3	
			Total	**23**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
26	MKWP	HKM 420	Hukum Agraria	3 (3-0)	4	
27	MKWP	HKM 421	Hukum Adat	3 (3-0)	4	
28	MKWP	HKM 422	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	3 (2-1)	4	
29	MKWP	HKM 423	Hukum Lingkungan	2 (2-0)	4	
30	MKWP	HKM 424	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama	2 (2-0)	4	
31	MKWP	HKM 425	Hukum Pidana Korupsi	2 (2-0)	4	
32	MKWP	HKM 426	Hukum Perusahaan	2 (2-0)	4	
33	MKWP	HKM 427	Hukum Pemerintahan Daerah	2 (2-0)	4	
34	MKWP	HKM 428	Sistem Peradilan Pidana	2 (2-0)	4	
35	MKWP	HKM 429	Hukum Laut Internasional	2 (2-0)	4	
			Total	**23**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
36	MKWP	HKM 530	Filsafat Hukum	2 (2-0)	5	

37	MKWP	HKM 531	Ilmu dan Teknik Perancangan Perundang-Undangan	2 (2-0)	5	
38	MKWP	HKM 532	Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak	2 (2-0)	5	
39	MKWP	HKM 533	Hukum Humaniter	2 (2-0)	5	
40	MKWP	HKM 534	Hukum Kemaritiman	2 (2-0)	5	
41	MKWP	HKM 535	Hak Kekayaan Intelektual	2 (2-0)	5	
42	MKWP	HKM 536	Kriminologi	2 (2-0)	5	
43		HKM 537	Hukum Pertambangan	2 (2-0)	5	
44		……	MK Program Peminatan (PP)	6 (6-0)	5	
			Total	**22**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
40	MKWP	HKM 638	Hukum Pajak	2 (2-0)	6	
41	MKWP	HKM 639	Hukum Siber	2 (2-0)	6	
42	MKWP	HKM 640	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2 (2-0)	6	
43	MKWP	…….	Mata Kuliah Program Peminatan (PP)	6 (6-0)	6	
			Total	**12**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
47	MOBE	HKM 746	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2 (2-0)	7	
48	MOBE	HKM 747	Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam	2 (2-0)	7	
49	MOBE	HKM 748	Hukum Administrasi Daerah	2 (2-0)	7	
50	MOBE	HKM 749	Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara	2 (2-0)	7	
51	MOBE	HKM 750	Hukum Pengelolaan Energi	2 (2-0)	7	
52	MOBE	HKM 751	Diskresi dan Beleidsregel	2 (2-0)	7	
53	MOBE	HKM 752	Hukum Kepegawaian	2 (2-0)	77	
54	MOBE	HKM 753	Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah	2 (2-0)	7	
55	MOBE	HKM 754	Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif HTN	2 (2-0)	7	
56	MOBE	HKM 755	Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	2 (2-0)	7	
57	MOBE	HKM 756	Hukum Pembuktian	2 (2-0)	7	
58	MOBE	HKM 757	Logika Hukum	2 (2-0)	7	
59	MOBE	HKM 758	Psikologi Hukum	2 (2-0)	7	
60	MOBE	HKM 759	Penelusuran Literatur Hukum	2 (2-0)	7	
61	MOBE	HKM 760	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	2 (2-0)	7	
62	MOBE	HKM 762	Antropologi Hukum	2 (2-0)	7	
63	MOBE	HKM 763	Hukum Imigrasi	2 (2-0)	7	
64	MOBE	HKM 764	Arbitrase	2 (2-0)	7	
65	MOBE	HKM 765	Hukum Kelautan dan Perikanan	2 (2-0)	7	
66	MOBE	HKM 766	Reforma Agraria	2 (2-0)	7	
67	MOBE	HKM 767	Penyesaian Delik Adat	2 (2-0)	7	

68	MOBE	HKM 768	Analisis Hukum dan Sosial	2 (2-0)	7	
69	MOBE	HKM 769	Hukum Pengawasan Aparatur Sipil Negara	2 (2-0)	7	
70	MOBE	HKM 780	Legal Momerandum dan Studi Kasus	2 (2-0)	7	
71	MOBE	HKM 781	Eksaminasi dan Legal Opinion	2 (2-0)	7	
72	MOBE	HKM 782	Hukum dan Partisipasi Publik	2 (2-0)	7	
73	MOBE	HKM 783	Analisis Data Penelitian	2 (2-0)	7	
74	MOBE	HKM 784	Teknik Pengumpulan Data Penelitian	2 (2-0)	7	
75	MOBE	HKM 785	Teknik Wawancara Responden	2 (2-0)	7	
75	MOBE	HKM 786	Teknik Penentuan Isu Penelitian Hukum	2 (2-0)	7	
76	MOBE	HKM 787	Teknik Publikasi Artikel Ilmiah	2 (2-0)	7	
77	MOBE	HKM 788	Hukum Kondominium	2 (2-0)	7	
78	MOBE	HKM 789	Analisis Dampak Lingkungan	2 (2-0)	7	
79	MOBE	HKM 790	Pemberdayaan Hukum Masyarakat	2 (2-0)	7	
80	MOBE	HKM 791	Perlindungan Disabilitas	2 (2-0)	7	
81	MOBE	HKM 792	Hukum Pariwisata	2 (2-0)	7	
82	MOBE	HKM 793	Hukum Pendaftaran Tanah	2 (2-0)	7	
83	MOBE	HKM 794	Hukum Pidana Lingkungan	2 (2-0)	7	
84	MOBE	HKM 795	Pengantar Statistika	2 (2-0)	7	
85	MOBE	HKM 796	Hukum Kawasan Pesisir	2 (2-0)	7	
86	MOBE	HKM 797	Penemuan Hukum	2 (2-0)	7	
87	MOBE	HKM 798	Hukum Transportasi	2 (2-0)	7	
89	MOBE	HKM 799	Hukum Perlindungan Nelayan	2 (2-0)	7	
			Total (pilihan)	**15**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
90	MKWU	UBB 409	Skripsi	6 (0-6)	7 & 8	Lulus Sidang Proposal Skripsi
			Total	**6**		
			TOTAL SKS	**148**		

PROGRAM PEMINATAN (PP) HUKUM KEPERDATAAN

Semester

Ganjil

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	MKPP	HPR 501	Hukum Keluarga dan Waris	2 (2-0)	5
2	MKPP	HPR 502	Hukum Jaminan	2 (2-0)	5
3	MKPP	HPR 503	Hukum Surat Berharga	2 (2-0)	5
4	MKPP	HPR 504	Hukum Perlindungan Konsumen	2 (2-0)	5
5	MKPP	HPR 505	Hukum Persaingan Usaha	2 (2-0)	5

Semester Genap

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR

1	MKPP	HPR 601	Hukum Kepailitan	2 (2-0)	6
2	MKPP	HPR 602	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2 (2-0)	6
3	MKPP	HPR 603	Hukum Pengangkutan	2 (2-0)	6
4	MKPP	HPR 604	Kapita Selekta Hukum Perdata	2 (2-0)	6
5	MKPP	HPR 605	Hukum Ekonomi Islam	2 (2-0)	6

PROGRAM KEKHUSUSAN (PP) HUKUM PIDANA

Semester Ganjil

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR
1	MKPP	HPD 501	Penologi	2 (2-0)	5
2	MKPP	HPD 502	Tindak Pidana Khusus	2 (2-0)	5
3	MKPP	HPD 503	Perbandingan Hukum Pidana	2 (2-0)	5
4	MKPP	HPD 504	Politik Hukum Pidana	2 (2-0)	5
5	MKPP	HPD 505	Hukum Kedokteran Forensik	2 (2-0)	5

Semester Genap

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR
1	MKPP	HPD 601	Hukum Peradilan Anak	2 (2-0)	6
2	MKPP	HPD 602	Viktimologi	2 (2-0)	6
3	MKPP	HPD 603	Hukum Pidana Ekonomi	2 (2-0)	6
4	MKPP	HPD 604	Hukum Pidana Korporasi	2 (2-0)	6
5	MKPP	HPD 605	Kapita Selekta Hukum Pidana	2 (2-0)	6

PROGRAM PEMINATAN (PP) HTN

Semester Ganjil

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR
1	MKPP	HTN 501	Hukum Lembaga-Lembaga Negara	2 (2-0)	5
2	MKPP	HTN 502	Hukum Tata Ruang	2 (2-0)	5
3	MKPP	HTN 503	Hukum Keuangan Negara	2 (2-0)	5
4	MKPP	HTN 504	Perbandingan HTN	2 (2-0)	5
5	MKPP	HTN 505	Hukum Perizinan	2 (2-0)	5

Semester Genap

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR
1	MKPP	HTN 601	Hukum Pemilu dan Kepartaian	2 (2-0)	6
2	MKPP	HTN 602	Hukum Kebijakan Publik dan Layanan Publik	2 (2-0)	6
3	MKPP	HTN 603	Hukum Kesehatan	2 (2-0)	6
4	MKPP	HTN 604	Kapita Selekta HTN	2 (2-0)	6
5	MKPP	HTN 605	Hukum Perkebunan dan Kehutanan	2 (2-0)	6

PROGRAM PEMINATAN (PP) HUKUM INTERNASIONAL

Semester Ganjil

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR
1	MKPP	HIL 501	Hukum Perburuhan Internasional	2 (2-0)	5
2	MKPP	HIL 502	Hukum Perjanjian Internasional	2 (2-0)	5
3	MKPP	HIL 503	Hukum Organisasi Internasional	2 (2-0)	5
4	MKPP	HIL 504	Hukum Pengungsi Internasional	2 (2-0)	5
5	MKPP	HIL 505	Hukum Pidana Internasional	2 (2-0)	5

Semester Genap

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR
1	MKPP	HIL 601	Hukum Perdagangan Internasional	2 (2-0)	6
2	MKPP	HIL 602	Hukum Ekonomi Internasional	2 (2-0)	6
3	MKPP	HIL 603	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2 (2-0)	6
4	MKPP	HIL 604	Hukum Perusahaan Transnasional	2 (2-0)	6
5	MKPP	HIL 605	Hukum Lingkungan Internasional	2 (2-0)	6

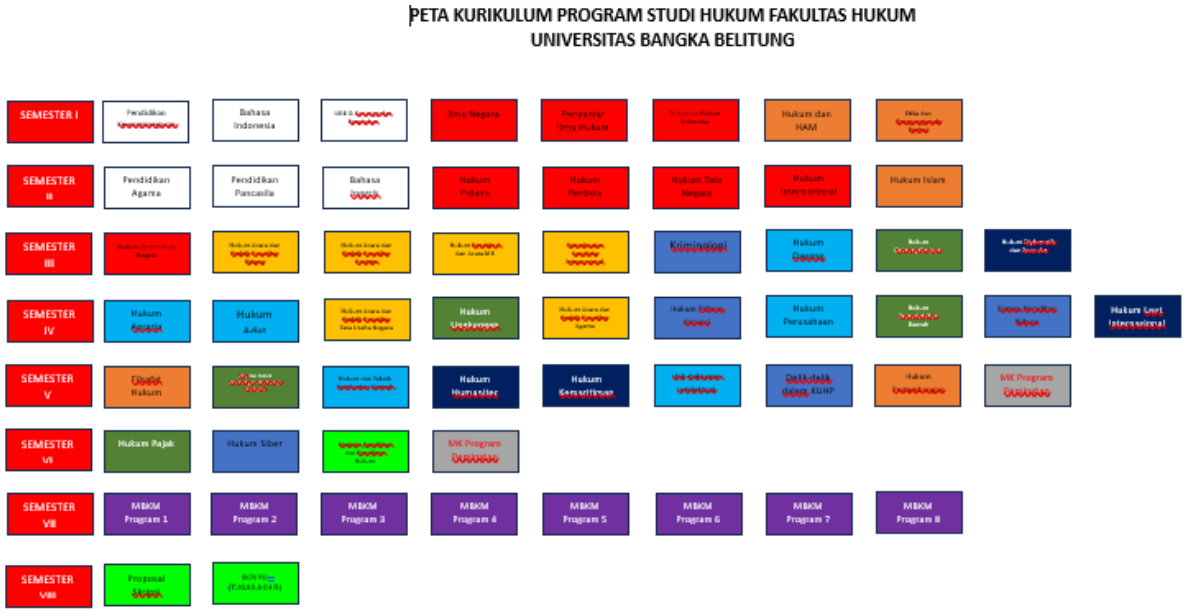
4. Silabus Mata Kuliah

Silabus berfungsi sebagai pedoman dan memberikan gambaran singkat terhadap semua mata kuliah yang ada di program studi. Minimal silabus berisi: nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah SKS, status mata kuliah, deskripsi mata kuliah, CPL/LO, CPMK, materi dan referensi. Penyusunan silabus dapat dibuat dalam bentuk tabel per-mata kuliah sebagai berikut:

Nama Mata Kuliah	Kode	MK Syarat	Bobot SKS	Semester	Kelompok MK
Tribologi	TMP4123	TMW213	3(3-0)	7	MK Pilihan
Deskripsi Mata Kuliah					
Matakuliah Tribologi mempelajari tentang xxxxxxxx					
Capaian Pembelajaran/ *Learning Outcome* (CPL/LO)					
Kode CPL/LO	CPL/LO		Kode CPMK/ CLO	CPMK/CLO	
CPL-01	Xxxx		CPMK-1	Xxxxxx	
			CPMK-2	Xxxxx	
			CPMK-3	Xxxx	
CPL-05	Xxxx		CPMK-1	Xxxx	
			CPMK-2	Xxxx	
dst					
Materi					
Referensi					

5. Peta Kurikulum

Buatlah peta kurikulum berdasarkan sebaran mata kuliah tiap semester, tanda panah merupakan mata kuliah syarat di semester berikutnya sehingga terbentuk jejaring yang merucut pada mata kuliah skripsi di semester 8. Contoh bentuk peta kurikulum:



Gambar 3. Peta Kurikulum

6. Ekuivalensi dan transfer Mata Kuliah

Pengembangan tatacara ekuivalensi dan transfer mata kuliah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan akademik dimana terjadi perubahan kurikulum 2020 ke Kurikulum 2024, sehingga harus dilakukan ekuivalensi matakuliah dan transfer nilai antar kurikulum tersebut. Untuk mahasiswa di bawah angkatan 2023 menggunakan kurikulum 2020 dengan melakukan konversi dari kurikulum 2020 pada mata kuliah yang belum di ambil ataupun mengulang. Sedangkan angkatan 2024 dan seterusnya akan menggunakan kurikulum 2024 secara penuh. Permasalahan akan muncul untuk dicarikan solusi penyelesaian tata cara ekivalensi mata kuliah bagi angkatan yang mengadopsi beberapa kurikulum tersebut. Konsep dasar tersebut pada intinya memuat semangat dan prinsip sebagai berikut:

a. Tidak merugikan mahasiswa,
b. Tidak menyulitkan pelaksana/pengelola,
c. Bentuk ekuivalensi dan konversi sederhana, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,
d. Diselesaikan dalam waktu singkat sehingga tidak menambah masa studi.

Permasalahan yang akan timbul setelah adanya perubahan kurikulum akan lebih kompleks. Berbagai bentuk penyelesaian yang berbeda untuk setiap kasus masalah yang nanti ditemukan perlu dilakukan. Untuk itu perubahan tersebut diklasifikasikan dalam beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Penggabungan mata kuliah,
b. Penghapusan mata kuliah,

c. Pemindahan mata kuliah dari satu semester ke semester lain,
d. Perubahan nama mata kuliah, silabus tetap,
e. Mata kuliah baru,
f. Perubahan bobot sks mata kuliah (berkurang atau bertambah)

1). Indikasi Permasalahan dan Penyelesaian

Kasus yang akan dijumpai dalam pelaksanaan transfer dan ekivalensi matakuliah perubahan kurikulum 2020 ke Kurikulum 2024 adalah sebagai berikut:

a) Bagi mahasiswa angkatan 2023 ke bawah yang telah menggunakan kurikulum kurikulum 2020 akan melakukan konversi mata kuliah yang belum dipenuhi oleh mahasiswa angkatan tersebut ke kurikulum 2024.
b) Mulai angkatan 2024 dan seterusnya sampai dengan perubahan kurikulum baru nantinya, tetap menyelesaikan kurikulum 2024 tersebut sampai dengan semua mahasiswa pada angkatan tersebut selesai.
c) Pada intinya program studi melaksanakan 1 (satu) kurikulum dengan melakukan konversi dari kurikulum 2020 ke kurikulum 2024 yang menjadi prioritas. Bisa dipastikan seluruh mata kuliah pada kurikulum 2020 terdapat matakuliah konversinya di kurikulum 2024 sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan pada matakuliah tersebut.

Berdasarkan indikasi permasalahan tersebut, selanjutnya dilakukan pengelompokan kedalam kasus-kasus dimana penyelesaian ada yang bersifat mudah, dan ada yang kompleks. Penyelesaian tersebut diarahkan agar mahasiswa tidak dirugikan (tidak mengurangi kualitas), walaupun kemungkinan ada juga mahasiswa yang dirugikan. Namun demikian diharapkan semua bentuk penyelesaian memenuhi atau mengikuti konsep dasar yang telah ditetapkan.

2). Tatacara/Pedoman

Sejalan dengan hal-hal yang diuraikan dalam konsep dasar, telah disusun suatu tata cara ekivalensi dan konversi nilai yang memuat aturan berikut:

a) Semua matakuliah yang telah diambil di kurikulum 2020 akan diakui dan transkrip nilai yang dikeluarkan merujuk kurikulum 2024.
b) Jika terdapat matakuliah yang belum lulus kurikulum 2020, akan dialihkan mengambil matakuliah konversi pada kurikulum 2024.
c) Nilai yang dimiliki mahasiswa di bawah angkatan 2023 sebagai pengguna kurikulum 2020 dapat diperoleh dari nilai matakuliah yang diambil pada kurikulum 2020, atau nilai hasil matakuliah konversi yang diambil pada kurikulum 2024.
d) Jika nantinya mahasiwa yang bersangkutan pengguna kurikulum 2020 menggulang kembali matakuliah konversinya tersebut, maka nilai tersebut tetap diakui jika nilai matakuliah konversinya lebih baik dari nilai matakuliah pada kurikulum 2024.
e) Semua matakuliah yang telah diambil di kurikulum 2024, maka transkrip nilai yang dikeluarkan merujuk kurikulum 2024.

Tabel 11. Contoh Ekuivalensi dan Konversi Mata kuliah

No	MK Kurikulum 2020			MK Konversi di Kurikulum 2024			Kasus	Alasan Perubahan	Solusi
	Kode MK	MK	SKS (T-P)	Kode MK	MK	SKS (T-P)			
1	HK 636	Hukum Telematika dan Bisnis Digital	2(2-0)	HKM 639	Hukum Siber	2(2-0)	Kode MK & Nama MK berubah	Penyesuaian terhadap perkembangan keilmuan terkait pentingnya pemahaman hukum siber	Jika mengulang HK636 (2020), ekuivalensinya mengambil HK639 (2024)
2	HK425	Sosiologi Hukum	2(2-0)	HKM 536	Delik- Delik Dalam KUHP	2(2-0)	Kode MK & Nama MK berubah	Memfokuskan keilmuan hukum secara materiil	Jika mengulang HK312 (2020), ekuivalensinya mengambil HK313 (2024)
3	HK 533	Metode Penemuan Hukum	2 (2-0)	HKM 315	Penyelesaian Sengketa Internasional	2(2-0)	Kode MK & Nama MK berubah	Memfokuskan keilmuan hukum secara materil	Jika mengulang HK533 (2020), ekuivalensinya mengambil HK315 (2024)

Tabel 12. Ekuivalensi seluruh mata kuliah dari kurikulum 2020 ke kurikulum 2024

NO.	MATA KULIAH KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA 2020-2024			MATA KULIAH KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE) 2024-2028			KETERANGAN
	KODE MK	MATA KULIAH	SKS (T-P)	KODE MK	MATA KULIAH	SKS (T-P)	
SEMESTER I				**SEMESTER I**			
1	UBB 103	Pendidikan Kewarganegaraan	2 (2-0)	UBB 103	Pendidikan Kewarganegaraan	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
2	UBB 105	Bahasa Indonesia	2 (2-0)	UBB 105	Bahasa Indonesia	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
3	UBB 108	UBB dan Keunggulan Peradaban	2 (2-0)	UBB 108	UBB dan Keunggulan Peradaban	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
4	HK 101	Ilmu Negara	2 (2-0)	HKM 101	Ilmu Negara	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
5	HK 102	Pengantar Ilmu Hukum	4 (4-0)	HKM 102	Pengantar Ilmu Hukum	4 (4-0)	Tidak ada perubahan
6	HK 103	Pengantar Hukum Indonesia	4 (4-0)	HKM 103	Pengantar Hukum Indonesia	4 (4-0)	Tidak ada perubahan
7	HK 104	Hukum dan HAM	2 (2-0)	HKM 104	Hukum dan HAM	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
8	HK 105	Hukum Islam	2 (2-0)	HKM 105	Etika dan Tanggung Jawaban Profesi	2 (2-0)	Perubahan Kode dan penempatan didahului kuliah Pendidikan Agama
		TOTAL SKS	**20**		**TOTAL SKS**	**20**	
SEMESTER II				**SEMESTER II**			
1	UBB 101	Pendidikan Agama	2 (2-0)	UBB 101	Pendidikan Agama	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
2	UBB 102	Pendidikan Pancasila	2 (2-0)	UBB 102	Pendidikan Pancasila	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
3	UBB 104	Bahasa Inggris	2 (2-0)	UBB 104	Bahasa Inggris	2 (2-0)	Tidak ada perubahan

4	HK 206	Hukum Pidana	4 (4-0)	HKM 206	Hukum Pidana	3 (3-0)	Perubahan sks untuk rasionalisasi matakuliah hukum teori
5	HK 207	Hukum Perdata	4 (4-0)	HKM 207	Hukum Perdata	3 (3-0)	Perubahan sks untuk rasionalisasi matakuliah hukum teori
6	HK 208	Hukum Tata Negara	4 (4-0)	HKM 208	Hukum Tata Negara	3 (3-0)	Perubahan sks untuk rasionalisasi matakuliah hukum teori
7	HK 209	Hukum Internasional	2 (2-0)	HKM 209	Hukum Internasional	3 (3-0)	Perubahan sks untuk rasionalisasi matakuliah hukum teori
8				HKM 210	Hukum Islam	2 (2-0)	Perubahan kode dan penempatan di semester gasal
		TOTAL SKS	**20**		**TOTAL SKS**	**20**	
SEMESTER III				**SEMESTER III**			
1	HK 310	Hukum Lingkungan	2 (2-0)	HKM 311	Hukum Administrasi Negara	3 (3-0)	Perubahan sks untuk rasionalisasi matakuliah hukum teori
2	HK 311	Hukum Acara Pidana	3 (3-0)	HKM 312	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana	3 (2-1)	Perubahan nama dan kode
3	HK 312	Hukum Acara Perdata	3 (3-0)	HKM 313	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata	3 (2-1)	Perubahan nama dan kode
4	HK 313	Hukum Agraria	3 (3-0)	HKM 314	Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi	3 (2-1)	Perubahan sks
5	HK 314	Hukum Konstitusi dan Acara MK	2 (2-0)	HKM 315	Penyelesaian Sengketa Internasional	2 (2-0)	Perubahan kode dan MK wajib baru menyesuaikan profile lulusan
6	HK 315	Hukum Administrasi Negara	4 (4-0)	HKM 316	Delik-Delik Dalam KUHP	2 (2-0)	Tidak ada perubahan

7	HK 316	Hukum Dagang	3 (3-0)	HKM 317	Hukum Dagang	3 (3-0)	Tidak ada perubahan
8				HKM 318	Hukum Ketenagakerjaan	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
9				HKM 319	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2 (2-0)	Perubahan kode dan MK wajib baru menyesuaikan profile lulusan
		TOTAL SKS	**20**		**TOTAL SKS**	**23**	
SEMESTER IV				**SEMESTER IV**			
1	HK 417	Hukum Adat	2 (2-0)	HKM 420	Hukum Agraria	3 (3-0)	Tidak ada perubahan
2	HK 418	hukum Acara TUN	2 (2-0)	HKM 421	Hukum Adat	3 (3-0)	Perubahan sks
3	HK 419	Kriminologi	2 (2-0)	HKM 422	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	3 (2-1)	Perubahan nama dan kode
4	HK 420	Hukum Perusahaan	2 (2-0)	HKM 423	Hukum Lingkungan	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
5	HK 421	Hukum Ketenagakerjaan	2 (2-0)	HKM 424	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan kode
6	HK 422	Hukum Acara Peradilan Agama	2 (2-0)	HKM 425	Hukum Pidana Korupsi	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
7	HK 423	Hukum Laut Internasional	2 (2-0)	HKM 426	Hukum Perusahaan	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
8	HK 424	Sistem Peradilan Pidana	2 (2-0)	HKM 427	Hukum Pemerintahan Daerah	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
9	HK 425	Sosiologi Hukum	2 (2-0)	HKM 428	Sistem Peradilan Pidana	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
10	HK 426	Hukum Pemerintahan Daerah dan OTDA	2 (2-0)	HKM 429	Hukum Laut Internasional	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
		TOTAL SKS	**20**		**TOTAL SKS**	**23**	
SEMESTER V				**SEMESTER V**			
1	HK 527	Hukum Humaniter	2 (2-0)	HKM 530	Filsafat Hukum	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
2	HK 528	Filsafat Hukum	2 (2-0)	HKM 531	Ilmu dan Teknik Perancangan Perundang-Undangan	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
3	HK 529	Etika dan Tanggungjawab Profesi	2 (2-0)	HKM 532	Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak	2 (2-0)	Tidak ada perubahan

4	HK 530	Ilmu dan Teknik Perancangan Undang-Undang	2 (2-0)	HKM 533	Hukum Humaniter	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
5	HK 531	Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak	2 (2-0)	HKM 534	Hukum Kemaritiman	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
6	HK 532	Praktek Peradilan	2 (2-0)	HKM 535	Hak Kekayaan Intelektual	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
7	HK 533	Metode Penemuan Hukum	2 (2-0)	HKM 536	Kriminologi	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
8		Mata Kuliah Program Peminatan (PP)	6 (6-0)	HKM 537	Hukum Pertambangan	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
					Mata Kuliah Program Peminatan (PP)	6 (6-0)	Tidak ada perubahan
		TOTAL SKS	**20**		**TOTAL SKS**	**22**	
SEMESTER VI				**SEMESTER VI**			
1	HK 634	Hukum Kemaritiman	2 (2-0)	HKM 638	Hukum Pajak	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
2	HK 635	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	2 (2-0)	HKM 639	Hukum Siber	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
3	HK 636	Hukum Telematika dan Bisnis Digital	2 (2-0)	HKM 640	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
4	HK 637	Hukum Pertambangan	2 (2-0)	HKM 645	Mata Kuliah Program Peminatan (PP)	6 (6-0)	Tidak ada perubahan
5	HK 638	Hukum Pajak	2 (2-0)				
6	HK 639	Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Khusus Lainnya	2 (2-0)				
7	HK 640	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)	2 (2-0)				
8		Mata Kuliah Program Peminatan (PP)	6 (6-0)				
		TOTAL SKS	**20**		**TOTAL SKS**	**12**	
SEMESTER VII				**SEMESTER VII**			
1	HK 741	Pendidikan Anti Mal Administrasi	2 (2-0)	HKM 746	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode

2	HK 742	Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI	2 (2-0)	HKM 747	Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
3	HK 743	Hukum Kebijakan Pemda	2 (2-0)	HKM 748	Hukum Administrasi Daerah	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
4	HK 744	Hukum Keuangan Daerah	2 (2-0)	HKM 749	Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
5	HK 745	Hukum Layanan Publik	2 (2-0)	HKM 750	Hukum Pengelolaan Energi	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
6	HK 746	Hukum Administrasi Kependudukan	2 (2-0)	HKM 751	Diskresi dan Beleidsregel	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
7	HK 747	Pendaftaran Tanah	2 (2-0)	HKM 752	Hukum Kepegawaian	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
8	HK 748	Tehnis Pembuatan Akta Pendirian Badan Hukum	2 (2-0)	HKM 753	Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
9	HK 749	Dasar-dasar Pembuatan Akta Perjanjian	2 (2-0)	HKM 754	Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif HTN	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
10	HK 750	Dasar-dasar Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga	2 (2-0)	HKM 755	Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
11	HK 751	Legalisasi dan Waarmerking	2 (2-0)	HKM 756	Hukum Pembuktian	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
12	HK 752	Legal Officer	2 (2-0)	HKM 757	Logika Hukum	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
13	HK 753	Konsultan hukum	2 (2-0)	HKM 758	Psikologi Hukum	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
14	HK 754	Legal Corporate	2 (2-0)	HKM 759	Penelusuran Literatur Hukum	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
15	HK 755	Hukum Organisasi Perusahaan	2 (2-0)	HKM 760	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
16	HK 756	Kapita Selekta Hukum Perusahaan	2 (2-0)	HKM 761	Antropologi Hukum	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
17	HK 757	Pengantar Ekonomi Syariah	2 (2-0)	HKM 762	Hukum Imigrasi	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode

18	HK 758	Hukum Perbankan Syariah	2 (2-0)	HKM 763	Arbitrase	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
19	HK 759	Praktek Peradilan Agama	2 (2-0)	HKM 764	Hukum Kelautan dan Perikanan	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
20	HK 760	Hukum Perjanjian Islam	2 (2-0)	HKM 765	Reforma Agraria	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
21	HK 761	Hukum Waris dan Perkawinan Islam	2 (2-0)	HKM 766	Penyesaian Delik Adat	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
22	HK 762	Teknis Perumusan Putusan	2 (2-0)	HKM 767	Analisis Hukum dan Sosial	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
23	HK 763	Mediasi di Pengadilan	2 (2-0)	HKM 768	Hukum Pengawasan Aparatur Sipil Negara	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
24	HK 764	Teknologi Informasi Peradilan	2 (2-0)	HKM 769	Legal Momerandum dan Studi Kasus	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
25	HK 765	Praktek Peradilan Hubungan Industrial	2 (2-0)	HKM 780	Eksaminasi dan Legal Opinion	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
26	HK 766	Praktek Peradilan Anak	2 (2-0)	HKM 781	Hukum dan Partisipasi Publik	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
27	HK 767	Teknis Perumusan dakwaan	2 (2-0)	HKM 782	Analisis Data Penelitian	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
28	HK 768	Teknis Perumusan Tuntutan	2 (2-0)	HKM 783	Teknik Pengumpulan Data Penelitian	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
29	HK 769	Praktek Jaksa Pengacara Negara	2 (2-0)	HKM 784	Teknik Wawancara Responden	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
30	HK 770	Praktek Pengawasan	2 (2-0)	HKM 785	Teknik Penentuan Isu Penelitian Hukum	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
31	HK 771	Layanan Publik Kejaksaan	2 (2-0)	HKM 786	Teknik Publikasi Artikel Ilmiah	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
32	HK 772	Advokatur	2 (2-0)	HKM 787	Hukum Kondominium	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
33	HK 773	Penelusuran Literatur Hukum	2 (2-0)	HKM 788	Analisis Dampak Lingkungan	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
34	HK 774	Praktek Argumentasi Hukum (Legal Reasoning)	2 (2-0)	HKM 789	Pemberdayaan Hukum Masyarakat	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode

35	HK 775	Legal Opinion	2 (2-0)	HKM 790	Perlindungan Disabilitas	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
36	HK 776	Teknik Wawancara Dengan Klien	2 (2-0)	HKM 791	Hukum Pariwisata	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
37	HK 777	Penegakan Hukum Terpadu	2 (2-0)	HKM 792	Hukum Pendaftaran Tanah	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
38	HK 778	Hukum Pidana Pemilu	2 (2-0)	HKM 793	Hukum Pidana Lingkungan	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
39	HK 779	Hubungan Tata Kerja KPU dan Bawaslu	2 (2-0)	HKM 794	Pengantar Statistika	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
40	HK 780	Penyelesaian Sengketa Pemilu	2 (2-0)	HKM 795	Hukum Kawasan Pesisir	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
41	HK 781	Teknologi Informasi Dalam Pemilu	2 (2-0)	HKM 796	Penemuan Hukum	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
42	HK 782	Teknis penyusunan Perdes	2 (2-0)	HKM 797	Hukum Transportasi	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
43	HK 783	Hukum Pemerintahan Desa	2 (2-0)	HKM 798	Hukum Perlindungan Nelayan	2 (2-0)	Perubahan nama dan kode
44	HK 784	Tata Kelola Desa	2 (2-0)				
45	HK 785	Praktek pengelolaan BUMDES	2 (2-0)				
46	HK 786	Hukum Tata Ruang Desa	2 (2-0)				
47	HK 787	Ekotourism (Pariwisata Berbasis Lingkungan)	2 (2-0)				
48	HK 788	Kepemimpinan	2 (2-0)				
49	HK 789	Kewirausahaan	2 (2-0)				
50	HK 790	Language Competency	2 (2-0)				
51	HK 791	Pengantar Ilmu Politik	2 (2-0)				
52	HK 792	Antropologi Hukum	2 (2-0)				
53	HK 793	Konsep Tata Ruang	2 (2-0)				

			2 (2-0)				
		TOTAL SKS	**106**		**TOTAL SKS**	**86**	
SEMESTER VIII							
1	UBB 409	Skripsi	6 (6-0)	UBB 409	Skripsi	6 (6-0)	Tidak ada perubahan
		TOTAL SKS	**8**		**TOTAL SKS**	**6**	
MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN					**MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN**		
	GASAL			**GASAL**			
1	HPR 501	Hukum Keluarga dan Waris	2 (2-0)	HPR 501	Hukum Keluarga dan Waris	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
2	HPR 502	Hukum Jaminan	2 (2-0)	HPR 502	Hukum Jaminan	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
3	HPR 503	Hukum Surat Berharga	2 (2-0)	HPR 503	Hukum Surat Berharga	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
4	HPR 504	Hukum Perlindungan Konsumen	2 (2-0)	HPR 504	Hukum Perlindungan Konsumen	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
5	HPR 505	Hukum Persaingan Usaha	2 (2-0)	HPR 505	Hukum Persaingan Usaha	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	GENAP			**GENAP**			
1	HPR 601	Hukum Kepailitan	2 (2-0)	HPR 601	Hukum Kepailitan	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
2	HPR 602	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2 (2-0)	HPR 602	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
3	HPR 603	Hukum Pengangkutan	2 (2-0)	HPR 603	Hukum Asuransi	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan kode
4	HPR 604	Kapita Selekta Hukum Perdata	2 (2-0)	HPR 604	Kapita Selekta Hukum Perdata	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
5	HPR 605	Hukum Ekonomi Islam	2 (2-0)	HPR 605	Hukum Ekonomi Islam	2 (2-0)	Tidak ada perubahan

MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN HUKUM PIDANA					**MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN HUKUM PIDANA**		
	GASAL				**GASAL**		
	HPD 501	Penologi	2 (2-0)	HPD 501	Penologi	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HPD 502	Hukum Kedokteran Kehakiman	2 (2-0)	HPD 502	Tindak Pidana Khusus	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan kode
	HPD 503	Perbandingan Hukum Pidana	2 (2-0)	HPD 503	Perbandingan Hukum Pidana	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HPD 504	Politik Hukum Pidana	2 (2-0)	HPD 504	Politik Hukum Pidana	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HPD 505	Hukum Pidana Internasional	2 (2-0)	HPD 505	Hukum Kedokteran Forensik	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan kode
	GENAP				**GENAP**		
	HPD 601	Hukum Peradilan Anak	2 (2-0)	HPD 601	Hukum Peradilan Anak	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HPD 602	Viktimologi	2 (2-0)	HPD 602	Viktimologi	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HPD 603	Hukum Pidana Lingkungan	2 (2-0)	HPD 603	Hukum Pidana Ekonomi	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan kode
	HPD 604	Tindak Pidana Korporasi	2 (2-0)	HPD 604	Hukum Pidana Korupsi	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HPD 605	Kapita Selekta Hukum Pidana	2 (2-0)	HPD 605	Kapita Selekta Hukum Pidana	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA					**MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA**		
	GASAL				**GASAL**		
	HTN 501	Hukum Lembaga-Lembaga Negara	2 (2-0)	HTN 501	Hukum Lembaga-Lembaga Negara	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HTN 502	Hukum Pengawasan Pemerintahan	2 (2-0)	HTN 502	Hukum Tata Ruang	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan kode

	HTN 503	Hukum Keuangan Negara	2 (2-0)	HTN 503	Hukum Keuangan Negara	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HTN 504	Perbandingan HTN	2 (2-0)	HTN 504	Perbandingan HTN	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HTN 505	Hukum Perizinan	2 (2-0)	HTN 505	Hukum Perizinan	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	GENAP			**GENAP**			
	HTN 601	Hukum Pemilu dan Kepartaian	2 (2-0)	HTN 601	Hukum Pemilu dan Kepartaian	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HTN 602	Hukum Kebijakan Publik	2 (2-0)	HTN 602	Hukum Kebijakan Publik dan Layanan Publik	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan kode
	HTN 603	Hukum Keimigrasian	2 (2-0)	HTN 603	Hukum Kesehatan	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan kode
	HTN 604	Kapita Selekta HTN	2 (2-0)	HTN 604	Kapita Selekta HTN	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HTN 605	Hukum Kelautan dan Perikanan	2 (2-0)	HTN 605	Hukum Perkebunan dan Kehutanan	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan kode
MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL				**MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL**			
	GASAL			**GASAL**			
	HI 501	Hukum Perusahaan Trans Nasional	2 (2-0)	HIL 501	Hukum Perburuhan Internasional	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan kode
	HI 502	Hukum Perdata Internasional	2 (2-0)	HIL 502	Hukum Perjanjian Internasional	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HI 503	Hukum Organisasi Internasional	2 (2-0)	HIL 503	Hukum Pengungsi Internasional	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan kode
	HI 504	Hukum Perjanjian Internasional	2 (2-0)	HIL 504	Hukum Organisasi Internasional	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HI 505	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2 (2-0)	HIL 505	Hukum Pidana Internasional	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan kode
	GENAP			**GENAP**			

	HI 601	Hukum Angkasa	2 (2-0)	HIL 601	Hukum Ekonomi Internasional	2 (2-0)	Perubahan nama MK dan Kode
	HI 602	Penyelesaian Sengketa Internasional	2 (2-0)	HIL 602	Hukum Perdagangan Internasional	2 (2-0)	Tidak ada perubahan
	HI 603	Hubungan Internasional	2 (2-0)	HIL 603	Hukum Perusahaan Transnasional	2 (2-0)	Perubahan Semester dan kode
	HI 604	Hukum Lingkungan Internasional	2 (2-0)	HIL 604	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2 (2-0)	Perubahan Semester dan kode
	HI 605	Hukum Perdagangan Internasional	2 (2-0)	HIL 605	Hukum Lingkungan Internasional	2 (2-0)	Perubahan Semester dan kode

MATA KULIAH REKOGNISI UNIVERSITAS

(Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung)

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	UBB 301	Komunikasi dan Kerjasama Tim	2
2.	UBB 302	Kepemimpinan Inklusif dan Inovatif	3
3.	UBB 303	Empati dan Kecerdasan Emosional	2
4.	UBB 304	Pengambilkan Keputusan Efektif	2
5.	UBB 305	Pemecahan Masalah Kompleks	3
6.	UBB 306	Berpikir Analitis dan Kritis	3
7.	UBB 307	Negosiasi dan Diplomasi	2
8.	UBB 308	Literasi Baru	2
9.	UBB 309	Etika dan Pengembangan Profesional	2
10.	UBB 310	Keberagaman dan Multibudaya	2
11.	UBB 311	Manajemen Even	2
12.	UBB 312	Inovasi dan Pemikiran Desain	2
13.	UBB 313	Kredensial Mikro	3
14.	UBB 314	Talenta Digital	2
15.	UBB 315	Pengembangan Masyarakat	2
16.	UBB 316	Kewirausahaan Sosial	2

K. RENCANA PENGAJARAN SEMESTER (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur kurikulum program studi. RPS sekurang kurangnya memuat:

a. Identitas Program Studi dan Mata Kuliah
b. Capaian Pembelajaran Lulusan *(Learning Outcome)*
c. Kemampuan Akhir
d. Bahan Kajian
e. Metode Pembelajaran
f. Alokasi Waktu yang Disediakan
g. Pengalaman Belajar
h. Kriteria Penilaian (Indikator, Instrumen dan Bobot Penilaian)
i. Referensi
j. Hirarki Pembelajaran

Dengan berpedoman pada RPS, diharapkan dosen dapat mengajar dengan sistematis, sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat berkontribusi langsung pada tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL/LO). RPS wajib dikembangkan dengan memperhatikan matrik-matrik pengembangan kurikulum. Penyusunan RPS hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL/LO yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
b. RPS atau istilah lain dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL/LO lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
c. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning* disingkat SCL)
d. RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

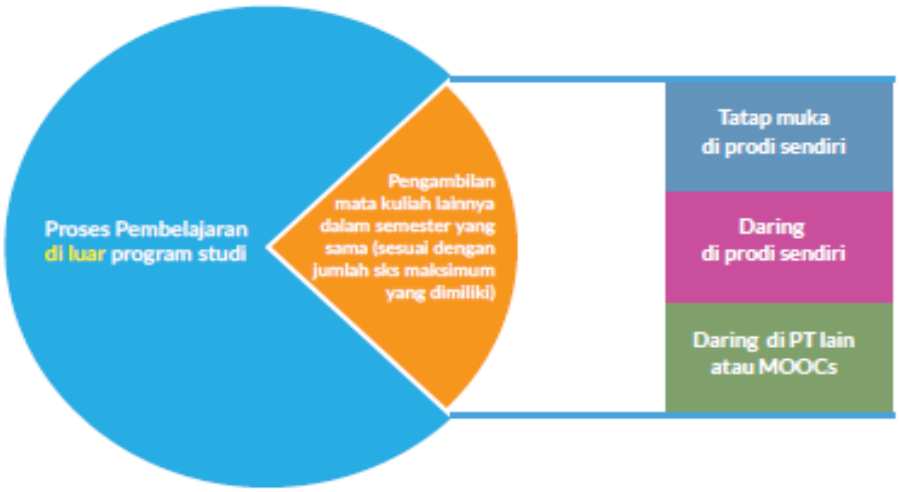
Template dan panduan pengisian RPS terpisah dari bab ini. Program studi wajib memasukkan semua RPS mata kuliah pada lampiran II.

L. STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

a. Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Program MBKM memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di dalam UBB, maupun di luar UBB. Sesuai dengan Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, terdapat berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar program studinya, seperti: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan, penelitian/riset di suatu instansi/ institusi, melakukan proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diambil oleh mahasiswa tersebar dalam maksimum 3 (tiga) semester.

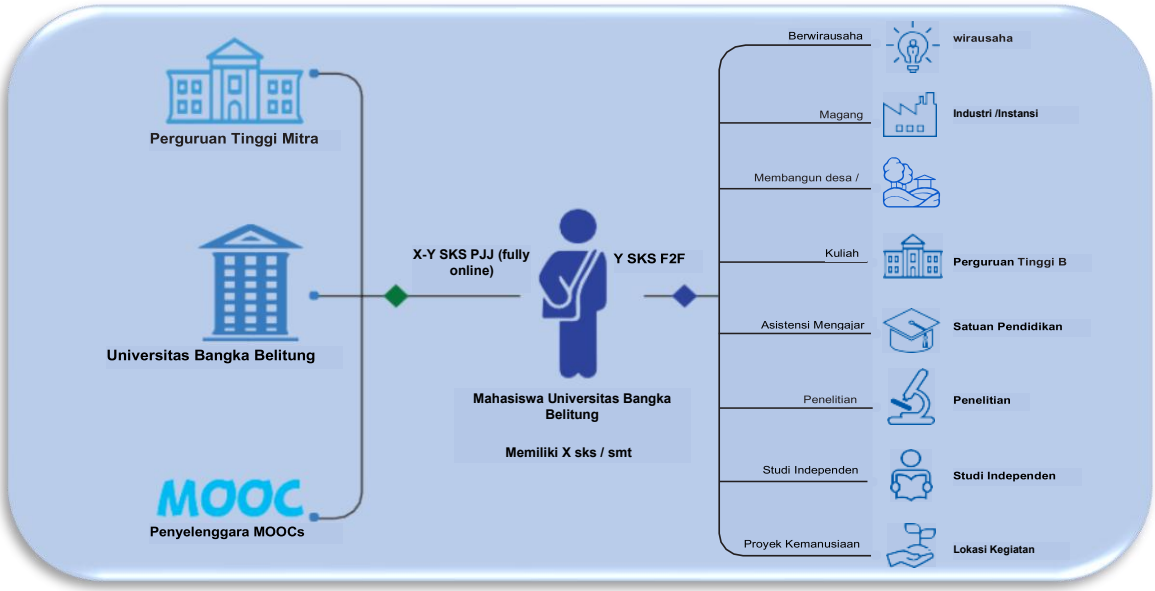
Pada berbagai kegiatan yang disebutkan di atas, mahasiswa tetap dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran lainnya (baik di program studi sendiri atau di sumber belajar lainnya) sesuai dengan jumlah maksimum beban sks yang dimiliki oleh mahasiswa pada suatu semester. Dalam hal ini, program studi perlu pula menyiapkan berbagai moda dan strategi pembelajaran untuk mengakomodir proses pembelajaran mahasiswa selama mereka melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di luar program studinya dengan **tidak mengurangi jumlah jam pelaksanaan MBKM di luar kampus**. Sebagai contoh ilustrasi, Gambar 4. menjelaskan beberapa skenario yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa di dalam menjalankan merdeka belajar.



Gambar 4. Proses Pembelajaran dalam 1 (satu) Semester Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Gambar 4 menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) semester, bila mahasiswa masih memiliki sejumlah sks yang diijinkan, di luar jumlah sks suatu kegiatan pembelajaran di luar program studi yang diambil, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil beberapa mata kuliah di dalam program studi (secara tatap muka atau daring) dan/atau di luar program studi (secara daring). Untuk mata kuliah yang diikuti di luar program studi mahasiswa dapat mengikutinya secara daring pada suatu institusi/perguruan tinggi lain atau mengambil mata kuliah yang tersedia pada suatu penyelenggara *Massive Open Online Courses* (MOOCs) yang diakui oleh program studi asal mahasiswa. Dengan demikian, meskipun mahasiswa sedang mengikuti proses pembelajaran di luar program studi, mahasiswa tersebut tetap dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah yang diambil di program studinya atau di luar program studi. Hal ini akan berdampak pada lama masa studi yang dapat ditempuh oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa tetap dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan di luar program studinya, namun tidak mempengaruhi masa studi yang harus ditempuh.

Khusus untuk kegiatan proses pembelajaran yang berupa perolehan kredit di luar program studi (baik secara daring maupun tatap muka di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain), mahasiswa juga tetap dimungkinkan untuk dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan skenario di atas (mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi lain/penyelenggara MOOCs), selama jumlah maksimum sks yang diizinkan dalam semester terkait masih dipenuhi. Hal ini secara ringkas digambarkan pada skenario yang diberikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Skenario Pembelajaran dalam 1 (satu) Semester Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Ilustrasi pada gambar 5 menunjukkan, sebagai contoh, seorang mahasiswa UBB pada suatu semester memiliki maksimum 21 sks (Matakuliah X sks), dan mahasiswa tersebut ingin mengambil 1 (satu) mata kuliah dengan bobot 3 sks (Matakuliah Y sks) di suatu Perguruan Tinggi lain (luar UBB) secara tatap muka *(face to face/*F2F), maka 18 sks sisanya masih dapat diikuti oleh mahasiswa tersebut dengan mengambil beberapa mata kuliah di UBB secara daring. Sebaliknya, bila Matakuliah Y sks yang akan diambil secara daring dari perguruan tinggi lain (luar UBB) atau mengambil melalui penyelenggara MOOCs, maka mahasiswa tersebut, tetap dapat mengikuti perkuliahan sejumlah (Matakuliah X-Y) sks secara tatap muka di UBB.

Skenario di atas perlu dipersiapkan oleh program studi atau UBB, terutama untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring yang diambil oleh mahasiswa dari prodinya sendiri. Ini semua memerlukan kesiapan terkait aplikasi (seperti Sistem Pengelola Pembelajaran/*Learning Management Systems)* dan infrastruktur yang memadai, yang memungkinkan mahasiswa dapat mengakses dan mengikuti proses pembelajaran secara daring.

Pendidikan Tinggi sangat berperan pada perubahan sosial masyarakat dan kemajuan suatu bangsa. Pada era digital seperti sekarang ini tidak bisa dihindarkan adanya potensi-potensi baru yang akan digunakan untuk percepatan kemajuan tersebut, salah satunya adalah MOOCs. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa MOOCs mempunyai potensi peran dalam berbagai aktivitas pembelajaran di pendidikan tinggi.

b. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Pengakuan Kredit dalam Transkrip

Ijazah diterbitkan UBB disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Transkrip Akademik adalah dokumen resmi UBB sebagai bukti sah akumulasi kegiatan akademik atau hasil pembelajaran setiap mata kuliah bersama bobot sks, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang dilaksanakan mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku dari suatu program studi mulai dari semester awal sampai pada semester akhir. Sebagai dokumen sah, Transkrip Akademik dibuat melalui prosedur operasional baku dan sebagai bagian penting sistem penjaminan mutu UBB. Standar-standar yang digunakan wajib mengacu pada SN-Dikti. Satuan Kredit Semester

(sks) dengan sendirinya juga mendapatkan pengakuan sah karena sks menunjukkan bobot waktu pembelajaran dari setiap mata kuliah di dalam transkrip akademik.

Bobot sks dari setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan CPL/LO (*Learning Outcome*) yang dibebankan kepada mata kuliah, yang diformulasikan lebih spesifik menjadi CPMK/CLO (*Course Learning Outcome*) dan Sub-CPMK/LLO (*Lecture Learning Outcome*), serta pengalaman belajar mahasiswa melalui bentuk-bentuk, metode-metode dan asesmen pembelajaran selama 16 minggu. Setiap mata kuliah dengan bobot sks dimasukkan ke dalam struktur kurikulum yang terdiri atas sejumlah semester tertentu tergantung pada jenjang program studi. Mata kuliah di dalam struktur kurikulum dengan bobot sks adalah bagian penting dokumen kurikulum program studi. Dokumen kurikulum selanjutnya disahkan oleh Rektor dan dijadikan dasar untuk pelaksanaan pembelajaran dan akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Dalam program MBKM mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi. SKS yang diambil sebanyak satu semester mata kuliah di luar program studi dan dua semester di luar UBB. Pengambilan mata kuliah di luar program studi, baik di dalam maupun diluar UBB dapat untuk memenuhi capaian pembelajaran yang sudah tertuang di dalam struktur kurikulum, ataupun untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Target program studi di dalam atau di luar UBB dalam lingkup nasional adalah dari program studi dengan syarat telah terakreditasi oleh BAN-PT/LAM/Akreditasi Internasional, sehingga secara langsung nilai sks mata kuliah mendapatkan pengakuan. Selain itu, UBB menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi tersebut dan mengembangkan kerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan mitra perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Kerjasama dapat dilakukan secara nasional dalam bentuk bilateral atau konsorsium (asosiasi prodi). Klaster adalah berdasarkan akreditasi atau zonasi (berdasarkan wilayah). Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti). Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Sedangkan program MBKM dua semester di luar program studi dengan bentuk kegiatan belajar pilihan seperti magang/ praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan

kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan/atau mengikuti program kemanusiaan. Penentuan bobot sks adalah berdasarkan atas susunan capaian pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan Pengetahuan, Sikap, keterampilan Umum dan/atau Keterampilan Khusus, serta waktu yang dibutuhkan membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi capaian pembelajaran tersebut. Satu sks adalah setara dengan 45 jam per-semester yang merupakan pengalaman belajar mahasiswa (berdasarkan SN-Dikti).

Penyusunan capaian pembelajaran dari bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dan rasionalisasi bobot sks berdasarkan SN-Dikti, dilakukan oleh tim kurikulum program studi, selanjutnya disahkan oleh Ketua Jurusan/Dekan. Berdasarkan susunan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, bentuk-bentuk kegiatan belajar tersebut dibuatkan RPS yang mengacu pada SN-Dikti, selanjutnya RPS disahkan oleh Koordinator Program Studi untuk diimplementasikan. Dengan demikian sks dari bentuk-bentuk kegiatan belajar secara sah dan mendapat pengakuan tercantum di dalam transkrip akademik. Setelah mendapat pengakuan dan kesetaraan dari program studi atas kegiatan pembelajaran MBKM yang dilakukan mahasiswa, Program studi melalui universitas melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

Terdapat 7 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM di Program Studi Hukum yaitu; Magang, Riset, Kewirausahaan, Membangun Desa/KKN Tematik, Studi/Proyek Independen, Proyek Kemanusiaan, dan Pertukaran Pelajar. Kegiatan 7 BKP tersebut disetarakan dengan maksimal 20 SKS. Mekanisme pelaksanaan dan konversi nilai MBKM ke kredit mata kuliah disesuaikan dengan buku pedoman pelaksanaan dan konversi nilai MBKM UBB.

2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Durasi pendidikan dan kisaran satuan kredit beragam antar Negara pada aras pendidikan yang sama. Seperti aras pendidikan Sarjana di Indonesia ditempuh selama 4 tahun dengan kredit minimal 144, di Malaysia ditempuh selama dengan kredit 120, di Thailand ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 120-180, dan di Jepang ditempuh selama 4 tahun dengan kredit 120. Perbedaan durasi pendidikan dan kisaran kredit ini untuk level pendidikan atau kualifikasi yang sama menimbulkan kesulitan dalam melakukan penyetaraan atau program kerjasama bergelar, kalau hanya disertai ijazah dan transkrip akademik. Untuk itu deskripsi capaian pembelajaran yang dituangkan dalam

suatu Surat Pendamping Ijazah (SKPI) menjadi sangat penting sebagai cara komunikasi antar kualifikasi. Adanya SKPI ini sangat mendukung penerapan KKNI serta pengakuan penyetaraan kualifikasi antar Negara.

Di dalam Permendikbud No. 59 tahun 2018 disebutkan bahwa SKPI adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan dinarasikan secara deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

UNESCO dalam konvensi tentang Pengakuan Studi, Diploma dan Gelar tentang Pendidikan Tinggi di Negara-negara Eropa tahun 1979, menyebutkan bahwa pengembangan kerjasama antar bangsa di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi, memainkan peran penting dalam mendorong dan memajukan perdamaian, dan pemahaman internasional. Pada tahun 2005, ijazah atau lulusan perguruan tinggi di Eropa sudah dilengkapi SKPI atau *diploma supplement.* Demikian pula yang lulus dari sekolah vokasi menerima sejenis SKPI yang disebut *Europass Certificate Supplement. Europass Certificate Supplement* sangat membantu pemberi kerja atau institusi pendidikan tinggi di luar Eropa untuk memahami kemampuan kerja dari pemegang sertifikat atau posisi kualifikasinya dalam *European Qualification Framework* sehingga mudah disandingkan dengan kualifikasi orang lain yang berasal dari sistem pendidikan yang berbeda.

c. Kebijakan Akademik Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 s/d 18. Pelaksanaan MBKM di UBB didasari atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dimana peraturan tersebut mewajibkan untuk dilakukan penyusunan pedoman kurikulum dan kebijakan akademik sebagai implementasi dari pelaksanaan program MBKM yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai

kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar UBB. Dan Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan Rektor No. 6 tahun 2020 Tentang kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung. Ketentuan pasal 14 ayat 2 menyatakan Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: a) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan b) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Selanjutnya pasal 14 ayat 4 disebutkan pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagimana dimaksud dapa ayat 2 huruf b dengan cara sebagai berikut:

a. Paling sedikit 5 (lima) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam jurusan/program studi
b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar jurusan/program studi asal ke jurusan/program studi lain yang ada di UBB; dan/atau
c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
    1. Pembelajaran pada jurusan/program studi yang sama di luar UBB;
    2. Pembelajaran pada jurusan/program studi yang berbeda di luar UBB; dan/atau
    3. Pembelajaran di Lembaga Mitra non Perguruan Tinggi;
d. Kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada poin b dan c dilaksanakan minimal pada semester 5 (lima).



Gambar 6. Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Terdapat empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM, meliputi:

1. Tetap fokus pada pencapaian CPL/LO.
2. Dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL/LO program studinya.
3. Dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya.
4. Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).

M. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yakni : (i) **Penetapan** kurikulum (P), (ii) **Pelaksanaan** Kurikulum (**P**), (iii) **Evaluasi** Kurikulum (**E**), (iv) **Pengendalian** Kurikulum (**P**), dan (v) **Peningkatan** kurikulum (**P**).

Berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2020, proses PPEPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Penetapan kurikulum** dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan Program Studi, CPL (*Learning Outcome),* mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi.
b. **Pelaksanaan kurikulum** dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL/LO pada lulusan. Evaluasi capaian pembelajaran pada setiap matakuliah (CPMK/CLO) dan sub matakuliah (Sub-CPMK/LLO) dilakukan untuk menjamin ketercapaian CPL. Pelaksanaan ketercapaian CPMK/CLO dan CPMK/LLO mengacu pada RPS dengan memperhatikan ketercapaian CPL/LO pada level MK. Sub-CPMK/LLO dan CPMK/CLO pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL/LO yang dibebankan pada setiap mata kuliah.
c. **Evaluasi pelaksanaan kurikulum** bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL/LO melalui ketercapaian CPMK/CLO. Evaluasi dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 atau 5 tahun sekali, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu Program Studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
d. **Pengendalian pelaksanaan kurikulum** dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
e. **Peningkatan kurikulum,** didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif. Siklus penjaminan mutu kurikulum selengkapnya dapat mengacu pada Siklus Kurikulum Pendidikan

Berikut adalah **contoh-contoh** dokumen untuk masing-masing siklus PPEPP Kurikulum:

Penetapan (P) : Prodi menyusun dokumen kurikulum berdasarkan Buku Panduan Kurikulum yang ditetapkan oleh Universitas. Standar Pembelajaran, Standar Penilaian, SOP/Instruksi Kerja pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian, dan SK Rektor/Dekan tentang Buku Kurikulum.

Pelaksanaan (P) : Laporan Pelaksanaan Kurikulum berupa Laporan Pencapaian CPL Prodi, pelaksanaan perkuliahan, pelaksanaan penilaian yang dilengkapi dengan Berita Acara Perkuliahaan dan Berita Acara Penyerahan Nilai.

Evaluasi (E) : Laporan evaluasi pelaksanaan kurikulum dapat berupa portfolio Prodi yang terdiri dari laporan pencapaian CPL. Sedangkan perkuliahaan dan penilaian dilaporkan dalam portfolio matakuliah yang memastikan ketercapaian CPL di setiap matakuliah tersebut.

Pengendalian (P) : Pengendalian kurikulum berupa monitoring ketercapaian CPL secara periodik dan monitoring Program Educational Objective (PEO) atau Profil Lulusan. Sedangkan pengendalian ketercapaian CPL dilakukan

dengan monitoring proses perkuliahan dengan melakukan analisis tren ketercapaian CPL dan CPMK.

Peningkatan (P) : Perbaikan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil pengukuran CPL dan hasil tracer studi. Perbaikan pengelolaan perkuliahaan dilakukan oleh universiatas atau unit dengan cara memperbaiki standar proses pembelajaran dan standar penilaian. Perbaikan konten perkuliahan dilakukan prodi dengan perbaikan RPS matakuliah.

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2024 - 2028